

**IMPLEMENTASI PROGRAM MALU MENGGUR OLEH
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
LAMPUNG TIMUR**

(Studi Kasus di Kecamatan Jabung dan Kecamatan Purbolinggo)

(Skripsi)

Oleh

RIJKIANA NUANSA ANTARI



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRACT

The Implementation of Malu Menganggur Program By The Department of Cooperatives of Small And Medium Enterprises And Manpower of East Lampung (A Case Study In Jabung And Purbolinggo Sub-Districts)

By

Rijkiana Nuansa Antari

A program called "Malu Menganggur" is an independent workforce program aims to empower communities from local government of East Lampung regency by providing specialized training to create products and its market home-based products by forming industry groups. The purpose of this study is to analyze the implementation of "Malu Menganggur" program and to analyze the obstacles in the implementation of "Malu Menganggur" program by the Department of Cooperatives of Small and Medium Enterprises and Manpower of East Lampung regency in Jabung and Purbolinggo sub-districts. The method used in this research was qualitative approach. The data collection techniques were conducted through interviews, observation and documentation.

The results showed that the implementation of "Malu Menganggur" program has not been well implemented, especially in the sub-district of Jabung. The limited implementation of the program was due to the uneven accomplishment of the program. The implementation of Malu Menganggur program, in Jabung sub-district did not develop because people merely focused on the funds and not being independent. While in Purbolinggo sub-district, the community was very enthusiastic although with circumstances of limited facilities and limited knowledge about the concept of self-employment. The inhibiting factors in the implementation of Malu Menganggur program was divided into internal and external factors. The internal factors was the limited funding from Local Government, there was no special fund allocated for Malu Menganggur program. While the external factors included: the lack of public awareness and community participation in the implementation of the program, the less awareness of the community to be open minded about the concept of self-employment. There are several suggestions for this research: it is necessary to hold socialization of advanced self-employment, to build a good coordination among the Activity Unit Management, and the local government must allocate special fund for Malu Menganggur program.

Keywords : Implementation, Malu Menganggur Program, Self Employed

ABSTRAK

Implementasi Program Malu Menganggur oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Lampung Timur (Studi Kasus di Kecamatan Jabung dan Kecamatan Purbolinggo)

Oleh

Rijkiana Nuansa Antari

Program Malu Menganggur merupakan suatu program tenaga kerja mandiri untuk memberdayakan masyarakat dengan memberikan pelatihan khusus untuk membuat produk dan memasarkan produk rumahan dengan membentuk kelompok industry. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi Program Malu Menganggur dan untuk menganalisis hambatan-hambatan dalam implementasi Program Malu Menganggur oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Timur di Kecamatan Jabung dan Kecamatan Purbolinggo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Malu Menganggur belum dilaksanakan dengan baik terutama di Kecamatan Jabung. Kurang maksimalnya pelaksanaan program dikarenakan pencapaiannya belum menunjukkan hasil yang merata. Pelaksanaan Program Malu Menganggur, di Kecamatan Jabung terlihat sangat sulit untuk berkembang karena masyarakat hanya terfokuskan dengan dana dan tidak mandiri. Di Kecamatan Purbolinggo, masyarakat sangat antusias meskipun dengan fasilitas yang terbatas juga dengan keterbatasan pengetahuan tentang konsep tenaga kerja mandiri. Faktor yang menjadi hambatan pelaksanaan Program Malu Menganggur adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu keterbatasan dana dari Pemerintah Daerah, belum adanya dana khusus untuk Program Malu Menganggur. Faktor eksternal yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program, sulitnya masyarakat untuk berfikir maju dan belum pahamnya masyarakat tentang konsep tenaga kerja mandiri. Saran penelitian, perlu adanya sosialisasi lanjutan tenaga kerja mandiri, perlu adanya koordinasi yang baik antar Unit Pengelola Kegiatan, dan perlu adanya dana khusus untuk Program Malu Menganggur.

Kata Kunci : Implementasi, Program Malu Menganggur, Tenaga Kerja Mandiri

**IMPLEMENTASI PROGRAM MALU MENGGUR OLEH
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
LAMPUNG TIMUR**

(Studi Kasus di Kecamatan Jabung dan Kecamatan Purbolinggo)

Oleh

RIJKIANA NUANSA ANTARI

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

SARJANA ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

Pada

Jurusan Ilmu Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2017**

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PROGRAM MALU
MENGANGGUR OLEH DINAS KOPERASI USAHA
KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
LAMPUNG TIMUR
(Studi Kasus di Kecamatan Jabung dan Kecamatan
Purbolinggo)**

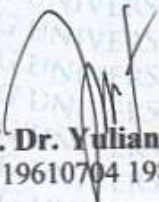
Nama Mahasiswa : **Rijkiana Nuansa Antari**

No. Pokok Mahasiswa : 1346041017

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik




Prof. Dr. Yulianto, M.S.
NIP 19610704 198803 1 005


Ita Prihantika, S.Sos., M.A.
NIP 19850705 200812 2 004

2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara


Dr. Noverman Duadji, M.Si.
NIP 19691103 200112 1 002

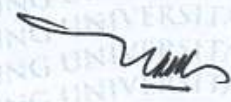
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Yulianto, M.S.



Sekretaris : Ita Prihantika, S.Sos., M.A.



Penguji Utama : Dr. Bambang Utoyo S., M.Si.



Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Syarif Makhya
19590803 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 21 Desember 2017

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi/Laporan akhir ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana/Ahli Madya), baik Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Bandar Lampung, 21 Desember 2017

Yang membuat pernyataan,



Rijkiana Nuansa Antari

NPM. 1346041017

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Rijkiana Nuansa Antari, lahir di Desa Margototo, pada tanggal 24 Mei 1995. Penulis merupakan anak Pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Syamsul Arifin dan Ibu Asmiyati. Pendidikan yang ditempuh oleh penulis dimulai dari Taman Kanak-kanak (TK) di TK Al Qur'an, Desa Sukadamai Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2000-2001. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 04 Margototo Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2001-2007. Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) penulis tempuh di SMP Negeri 05 Metro Selatan, Kota Metro pada tahun 2007-2010. Setelah itu, penulis meneruskan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 04 Metro Timur, Kota Metro pada tahun 2010-2013.

Pada Tahun 2013 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung dan tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (HIMAGARA). Pada Bulan Januari 2016, Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Kertasana Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran selama 60 hari.

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah diri mereka sendiri”.

(Q.S. Ar-Ra'd : 11)

*Tuhan tidak menuntut kita untuk sukses
Tuhan hanya menyuruh kita berjuang tanpa henti.*

(Emha Ainun Nadjib)

Hidup adalah pelajaran tentang kerendahan hati.

(Rijkiana Nuansa Antari)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan yang telah memberikan kesempatan sehingga dapat kuselesaikan sebuah karya ilmiah ini dan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan Syafaatnya di hari akhir kelak.

Aku persembahkan karya ini kepada:

Kedua orang tuaku:

Ayahanda Syamsul Arifin dan Ibunda Asmiyati yang selalu mencintai, menyayangi, mengasihi serta mendo'akanku dengan tulus dan sebagai penyemangat dalam hidupku.

Kakak dan adikku:

*Dhihaa Nuansa Lintang Ayu
Muhammad Maulana Dzaki Naufal*

yang senantiasa memberikan dukungan kepadaku sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Untuk keluarga besarku, sahabat-sahabatku dan juga teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan dukungan dan motivasi serta menemaniku dalam suka maupun duka dalam mencapai keberhasilanku.

Para Pendidik dan Almamaterku tercinta

UNIVERSITAS LAMPUNG

SANWACANA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikumwarrahmatullahiwabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, karunia, dan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Implementasi Program Malu Mengganggu oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Lampung Timur (Studi kasus di Kecamatan Jabung dan Kecamatan Purbolinggo)”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana (S1) pada Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Penulis menyampaikan ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan untuk itu penulis selalu mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pihak pembaca yang arif guna tugas selanjutnya di masa yang akan datang. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Syarief Makhya selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

2. Bapak Dr. Noverman Duadji, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Ibu Intan Fitri Meutia, M.A. Ph.D selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
4. Ibu Devi Yulianti, S.A.N, M.PA. selaku dosen Pembimbing Akademik (PA), terimakasih Ibu telah turut membantu memberikan kemudahan dan motivasi kepada penulis selama kuliah.
5. Bapak Prof. Dr. Yulianto, M.S. selaku dosen pembimbing utama, yang telah meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, nasehat, saran, motivasi serta semangat. Terimakasih Bapak atas bimbingan serta pelajaran berharga yang telah Bapak berikan sehingga penulis mampu menjadi pribadi yang lebih kuat dan ikhlas dalam menghadapi segala rintangan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Ita Prihantika, S.Sos, MA selaku dosen pembimbing kedua, yang telah senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan kepada penulis serta memberikan saran dan kritik dalam penulisan skripsi ini. Terimakasih Ibu dengan semua motivasi dan semangat yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi tepat waktu.
7. Bapak Dr. Bambang Utoyo S, M.Si selaku dosen pembahas dan penguji. Terimakasih Ibu telah memberikan banyak arahan, kritikan, nasihat, saran, serta masukan yang sangat bermanfaat sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi berkat bantuan dari Bapak selaku dosen pembahas.
8. Seluruh dosen Ilmu Administrasi Negara, terimakasih atas semua ilmu yang berharga yang telah penulis peroleh selama proses perkuliahan berlangsung.

Semoga ilmu yang sudah didapat menjadi bekal yang berharga dan bermanfaat dalam kehidupan penulis kedepannya.

9. Bapak Azhari, S.I.Kom dan Ibu Nur'aini selaku Staf Administrasi Negara yang telah memberikan pelayanan dan kelancaran administrasi kepada penulis sampai penyelesaian skripsi ini.
10. Seluruh Bapak/Ibu Karyawan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
11. Terimakasih untuk kedua orang tuaku, Ayahanda Syamsul Arifin dan Ibunda Asmiyati. Terimakasih atas kasih sayang yang telah Ayah dan Mama berikan kepada kakak, terima kasih atas semua do'a, mendukung, pengorbanan dan didikan yang selama ini Ayah dan Mama berikan kepada kakak, hingga kakak bisa menjadi seperti sekarang. Terimakasih atas keparcayaan dan amanat yang selama ini Ayah dan Mama berikan kepada kakak untuk menyelesaikan studi sehingga kakak bisa mencapai gelar Sarjana Administrasi Negara. Semoga dengan mendapatkan gelar S.A.P ini kakak bisa membahagiakan Ayah dan Mama, Aamiin.
12. Kakakku Dhihaa Nuansa Lintang Ayu dan Adikku Muhammad Maulana Dzaki Naufal yang telah memberi semangat, do'a dan dukungan kalian kepada Kak Rika dalam penyelesaian skripsi. Terimakasih untuk kakak-adikku yang paling Kak Rika sayangi. Semoga kita semua bisa menjadi orang sukses agar menjadi kebanggaan Mama dan Ayah, dapat membahagiakan Ayah dan Mama serta mengangkat derajat keluarga kita, Aamiin.
13. Keluarga besarku di Metro, Margototo, Margosari, Sukadamai, Karang Anyar, Pringsewu, Gisting, Kalianda, Semarang, Solo, Yogyakarta dan

Palembang, yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, terimakasih atas do'a dan dukungan yang selalu kalian berikan kepadaku.

14. Keluarga besar Rumah Hati Lampung, Mas Dika, Kak Beni, Om Odi, Om Cipto, Mas Ari, Om Saif, Om Sutris, Om Juli, Om Sulis, Om Dardiri, Mas Nanang, Om Kendar, Om Narto, Om Suryadi, Cik Ida, Mba Farista, Mba Erna, terimakasih atas do,a, dukungan dan kebersamaan yang selalu meramaikan suasana rumah. Hehe..
15. Keluarga besar Musik Jamus Kalimosodo, Om Dikin, Om Hendra, Akil, Om Supri, Tante Binti, Tokek, Rahmad, Asror, Jaka, Kak Wawan, Ihsan, Jadid, Yusuf Sogol, Om Minto, Amri, Om Toni, terimakasih atas semua do'a serta dukungan dan kebersamaan setiap minggunya di rumah.
16. Sahabatku sekaligus keluargaku, Mba Kenes dan Aa' Helmi serta Baby Shena, terimakasih atas do,a dan dukungannya serta perhatiannya setiap harinya, yang gak pernah bosan menjadi tempat keluh dan kesahku selama ini sampai aku bisa menyelesaikan skripsi ini, gak bosen kan? wkwk
17. Sahabat-sahabatku "Selusin" yang bertambah banyak, Sholihin, Farhan, Saifi, Kak Aan, Ariansyah, Mba Kenes, Mba Septi, Mba Vani, Dhanyl, Fatur, Willy, Indah, Kak Kilung. Terimakasih sudah meluangkan waktu untuk do'a, dukungan, kebersamaan, dan keharmonisan sampai detik ini, semoga tidak ada dusta di antara kita. Semoga silaturahmi diantara kita selalu terjaga hingga kita bisa sukses bersama, Aamiin.
18. Sahabat SMPku "Garniez", Helena, Lia, Septi, Rika, Diah, Lucky, Anita, Mayda. Terimakasih pertemanan selama 9 tahun ini yang sampai bingung untuk deskripsinnya wkwk. Semoga tidak bosan untuk silaturahmi bulanannya. Luv!

19. Sahabat SMAku “Ultra-milk Squad”, Putri Pramita Sari, Argana Satria, Lisa Ratna Sari, Brilian Dwi Hanggara, Rangga Fuad Anwar. Terimakasih gengs sudah mengisi hari-hariku dengan tawa, meng-spam setiap hari di Grup WA, semoga dengan begitu silaturahmi kita tetap terjaga. Sukses selalu untuk kalian yaa. Missyou!
20. Sahabatku Ellyza Dwi Sucahyo, Wahyu Ramadhon, Ayu Mira, Rio Firmanto. Terimakasih sudah banyak berperan dalam hidup gw, makasih sudah jadi sahabat yang baik, yang tidak pernah bergunjing di belakang, dan selalu support gw dalam keadaan apapun. Kiana sayang kalian. Semoga kesuksesan ada pada kalian. Loveyou guys.
21. Sahabatku Ade Maulidya dan Syntia Bela Tama. Terimakasih untuk pertemanan kita \pm 4 tahun selama perkuliahan ini. Maaf selalu direpotkan dalam segala hal, menjadi tempat mencurahkan isi hati, kesedihan dan kesusahan. Semoga kedepannya silaturahmi kita selalu terjaga. Sukses dikemudian hari adalah impian kita, tidak ada kata-kata yang bisa diungkapkan selain doa terbaik untuk kalian. Loveyou
22. Temanku Jita Aryani, Lidiya Karensa dan Pepy Cellya Fitriani, terimakasih kalian sudah menjadi teman selama ini, saran dan masukan yang kalian berikan mampu mengubah ku untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Semoga silaturahmi kita selalu terjaga dan meraih kesuksesan bersama.
23. Keluarga Pucuk Cempaka Diah Puji Lestari, Indah Wahyuni, Ade Maulidya, Syntia Bela Tama, Putri Aphrodite, Pratiwi Iswari, Oca Pawalin, dan Pepy Cellya. Terimakasih untuk kebersamaannya selama ini sudah menjadi alarm kosan di setiap pagiku, kalian yang terbaik selalu ada disaat senang maupun susah dan menghiburku dikala gundah.

24. Saudara sepahaku Dini Gusti Rini, terimakasih ya sist sudah selalu ada, jadi tempat saya curhat, paleng, bete, frustrasi, dan mengadu selama saya skripsi ini banyak ngeluhnya. Semoga kebaikan haqiqimu dibalas oleh Allah SWT dan dipermudahkan untuk mencapai gelar S.Pd. Aamiin.
25. Adik-Adikku, Umi Hidayatun, Mia Arta Oktavia, Atiyatun Nasyiah, Hanif Setiawan, dan Arif Wicaksono, terimakasih atas do'a, dukungan, candaan dan waktunya selama ini. Semoga urusan kalian selalu dipermudah dan kita bisa meraih kesuksesan bersama, semoga silaturahmi kita selalu terjaga.
26. Teman-teman perkuliahan, Andan Rahayu, Nurhafifah Zulta, Desti Eka, Rindu Nova, Arinta Ftriani, Eka Fitria. Terimakasih untuk kebersamaannya maaf jika selama ini belum bisa menjadi teman yang baik, semoga kedepannya silaturahmi diantara kita selalu terjaga dan kita bisa meraih kesuksesan bersama Aamiin
27. Kakak tingkat Ilmu Administrasi Negara yang Kiana sayangi, Dian Kharisma Putri, Annisa Rachmawati dan Novaria Indah Setiarini. Cukup bilang terimakasih selalu ada dan jangan kebanyakan ngegunjing dong ah wkwk. Luv,sist.
28. Para pembahas mahasiswa dan moderatorku dari proposal dan hasil, Eka Fitria, Nanda Nandani, Defita Selfiani, Prayoga Biantara. Terimakasih telah mendukung dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
29. Teman-teman KKN Desa Kertasana, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran: Faizin, Gege, Mita, Revi, Wiwin, Afrizal. Terimakasih selama KKN dua bulan kita saling menghargai, mengajarkan saya dalam bermasyarakat dengan baik, memaklumi satu sama lain dan senang sedih kita lalui bersama-sama. Semoga komunikasi kita tetap baik.

30. Teman-teman “Outsiders dan Lady Rose Lampung”, Gustin, Dian, Putri, Erima, Mba Uly, Jimmy, Odik, Danang Z, Danang P, Rizky Jangkung, Coni dan Cahya. Terimakasih sudah mengajarkan arti kebersamaan sesungguhnya dan bermanfaat untuk orang lain, meskipun sekarang sudah jarang sekali nge-basecamp, semoga komunikasi kita tetap terjaga. We Are Outsiders.
31. Teman-teman di Tribun Stadion, Agus Riyanto Subagio, Danang R Suganda, Riky Zulyanto, Aji Mahesa, Sandi DC, Yoni Kurniawan, Euis Laili Hardiyanti, Harnes Abrini, dan Retno Ayu. Terimakasih atas kebersamaan dan kekonyolan selama ini, semoga kita tetap ramai dan mencapai kesuksesan bersama.
32. Teman hidupku Andreas Laurence, terimakasih atas sifat militernya yang selalu gercepin saya untuk menyelesaikan skripsi ini, memotivasi, mendo’akan dan mendukung saya dari jarak yang tidak dekat. Makasih ya Dree atas kesabaran, kepercayaan, kesetiaan dalam jarak, dan selalu menjadi tempat keluh kesah saya, tempat absen online setiap harinya, dan masih banyak lagi, kalau ditulis semua nanti malah jadi novel. Hehe.. Semoga kita dapat mencapai kesuksesan dan cita-cita kita bersama, Aamiin.
33. Teman-teman seperjuangan Alas Menara. Terimakasih atas kekeluargaan dan kebersamaan selama \pm 4 Tahun ini. Semoga silaturahmi kita tetap terjaga.
34. Keluarga Besar Universitas Lampung yang telah membantu saya selama saya belajar di Universitas Lampung.
35. Semua Pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas bantuan.

Akhir kata semoga segala kebaikan dan bantuan yang diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT dan penulis meminta maaf apabila ada kesalahan yang disengaja atau pun tidak disengaja. Semoga skripsi ini bermanfaat.

Bandar Lampung, Desember 2017

Penulis,

Rijkiana Nuansa Antari

DAFTAR ISI

Halaman

| | |
|---|------------|
| DAFTAR ISI | i |
| DAFTAR TABEL | iii |
| DAFTAR GAMBAR | iv |
| | |
| I. PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 10 |
| C. Tujuan Penelitian | 10 |
| D. Manfaat Penelitian | 11 |
| | |
| II. TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Tinjauan tentang Kebijakan Publik | 12 |
| 1. Konsep Kebijakan Publik | 12 |
| 2. Proses Kebijakan Publik | 13 |
| 3. Tahap-Tahap Kebijakan Publik | 14 |
| B. Tinjauan tentang Implementasi Kebijakan | 16 |
| 1. Konsep Implementasi Kebijakan | 16 |
| 2. Model-Model Implementasi Kebijakan Publik | 17 |
| C. Tinjauan tentang Pembangunan Ekonomi Lokal | 24 |
| 1. Konsep Pembangunan Ekonomi Lokal | 24 |
| D. Tinjauan tentang Program Malu Menganggur | 25 |
| 1. Konsep Program Malu Menganggur | 25 |
| 2. Tujuan Program Malu Menganggur | 26 |
| 3. Sasaran Program Malu Menganggur | 26 |
| 4. Target Program Malu Menganggur | 27 |
| | |
| III. METODE PENELITIAN | |
| A. Tipe dan Pendekatan Penelitian | 28 |
| B. Fokus Penelitian | 28 |
| C. Lokasi Penelitian | 31 |
| D. Informan Penelitian | 32 |
| E. Sumber Data | 33 |
| F. Teknik Pengumpulan Data | 34 |
| G. Teknik Analisis Data | 35 |
| H. Teknik Keabsahan Data | 37 |

| | |
|--|-----|
| IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN | |
| A. Gambaran Umum Kabupaten Lampung Timur | 39 |
| 1. Profil Wilayah Kabupaten Lampung Timur | 39 |
| 2. Visi dan Misi Kabupaten Lampung Timur | 40 |
| 3. Demografi Kabupaten Lampung Timur | 41 |
| 4. Kondisi Perekonomian Kabupaten Lampung Timur | 43 |
| 5. Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Lampung Timur | 44 |
| 6. Jumlah Tenaga Kerja | 45 |
| 7. Sosial Budaya dan Lingkungan | 47 |
| B. Gambaran Umum Kecamatan Jabung | 47 |
| 1. Batas Administratif Kecamatan Jabung | 47 |
| 2. Demografi Kecamatan Jabung | 48 |
| 3. Mata Pencaharian Penduduk Kecamatan Jabung | 49 |
| C. Gambaran Umum Kecamatan Purbolinggo | 50 |
| 1. Batas Administratif Kecamatan Purbolinggo | 50 |
| 2. Keadaan Geografis dan Topografi Wilayah | 51 |
| 3. Demografi Kecamatan Purbolinggo | 51 |
| 4. Pendidikan di Kecamatan Purbolinggo | 53 |
| 5. Tata Guna Lahan | 54 |
| D. Gambaran Umum Program Malu Mengganggu | 55 |
| V. HASIL DAN PEMBAHASAN | |
| A. Implementasi Program Malu Mengganggu oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Lampung Timur (Studi Kasus di Kecamatan Jabung dan Kecamatan Purbolinggo) | 58 |
| 1. Standar dan Sasaran Kebijakan | 59 |
| 2. Sumber Daya | 66 |
| 3. Karakteristik Agen Pelaksana | 76 |
| 4. Disposisi Implementor | 80 |
| 5. Komunikasi Antar Organisasi | 84 |
| 6. Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik | 88 |
| B. Faktor Penghambat Implementasi Program Malu Mengganggu Oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Lampung Timur (Studi Kasus di Kecamatan Jabung dan Kecamatan Purbolinggo) | 100 |
| VI. KESIMPULAN DAN SARAN | |
| A. Kesimpulan | 103 |
| B. Saran | 106 |

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|--|---------|
| Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin Terbanyak di Lampung | 3 |
| Tabel 2. Informan Penelitian | 32 |
| Tabel 3. Jumlah Penduduk Kabupaten Lampung Timur 2010-2014..... | 42 |
| Tabel 4. Jumlah Penduduk Miskin Per Kecamatan | 45 |
| Tabel 5. Indikator Ketenagakerjaan Tahun 2010-2014 | 46 |
| Tabel 6. Jumlah Penduduk Kecamatan Jabung 2014 | 49 |
| Tabel 7. Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan Umum Di Kecamatan Jabung | 49 |
| Tabel 8. Jumlah Penduduk Kecamatan Purbolinggo 2015 | 52 |
| Tabel 9. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian di Kecamatan Purbolinggo Tahun 2015 | 53 |
| Tabel 10. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan Purbolinggo Tahun 2015 | 54 |
| Tabel 11. Luas dan Produksi Tanaman Pertanian di Kecamatan Purbolinggo Tahun 2015 | 54 |
| Tabel 12. JumlahKelompokIndustri Program MaluMenganggur di Kabupaten Lampung Timur..... | 57 |
| Tabel 13. Jumlah Pengangguran Berdasarkan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Lampung Timur Tahun 2012-2014 | 89 |

DAFTAR GAMBAR

| | Halaman |
|---|---------|
| Gambar 1. Peta Wilayah Kabupaten Lampung Timur | 39 |
| Gambar 2. Kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja Mandiri pada Program Malu Menganggur | 91 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan penduduk di Indonesia dari masa ke masa, maka kebutuhan dan kepentingan manusia semakin meningkat. Namun, kebutuhan dan kepentingan manusia yang semakin meningkat tidak seimbang dengan tingkat perekonomian setiap masyarakat. Tingkat perekonomian yang rendah menjadi permasalahan serius dan berdampak terhadap meningkatnya kemiskinan di suatu daerah. Meningkatnya kemiskinan ini disebabkan karena jumlah pengangguran yang semakin meningkat dan diimbangi dengan minimnya jumlah lapangan pekerjaan.

Penyerapan tenaga kerja merupakan salah satu indikator untuk menilai keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara. Penyerapan tenaga kerja dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain adalah pendapatan nasional, tingkat investasi, dan upah tenaga kerja. Perubahan pada faktor-faktor tersebut akan mempengaruhi tingkat penyerapan tenaga kerja. Adanya penyerapan tenaga kerja ini memberikan peluang bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi yang menjadi sumber pendapatan sehingga

dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Meningkatnya jumlah angkatan kerja dalam waktu yang cepat dan jumlah yang tinggi, sementara kesempatan kerja yang tersedia sangat terbatas akan menyebabkan timbulnya pengangguran. Inilah yang membuat permasalahan ketenagakerjaan secara langsung maupun tidak langsung akan berkaitan dengan masalah-masalah lainnya seperti ketidakmerataan pendapatan, kemiskinan, keterlambatan pertumbuhan ekonomi, urbanisasi dan instabilitas politik. Oleh karena itu, berbagai upaya terus dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja untuk mengurangi jumlah pengangguran yang berimplikasi terhadap lambatnya laju pertumbuhan ekonomi, mengingat semakin meningkatnya jumlah angkatan kerja baru yang memasuki pasar kerja.

Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi yang memiliki wilayah yang cukup luas dan mempunyai sumber daya manusia serta alam yang cukup memadai serta jumlah penduduk yang tidak sedikit. Pada tahun 2006 kemiskinan Provinsi Lampung meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 21,42% menjadi 22,77% pada tahun 2006. Kenaikan tingkat kemiskinan tersebut disebabkan oleh naiknya harga minyak dunia, pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak dan menyebabkan harga-harga bahan kebutuhan pokok naik, sehingga konsumsi masyarakat menurun. Namun, pada tahun 2007 sampai dengan 2014 tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung mulai menurun, kondisi perekonomian nasional yang sudah stabil, harga bahan pokok sudah menurun dan rata-rata upah juga naik (Badan Pusat Statistik Lampung, 2017).

Kesejahteraan masyarakat dapat ditentukan oleh tingkat pendapatan masyarakat. Pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dapat terwujud. Hal ini berarti, semakin tinggi jumlah pengangguran maka akan meningkatkan jumlah penduduk miskin. Besarnya tingkat pengangguran merupakan cerminan kurang berhasilnya pembangunan di suatu daerah. Apabila seseorang tidak bekerja atau menganggur maka akan mengurangi pendapatan, hal ini akan mengurangi tingkat kemakmuran yang mereka capai dan dapat menimbulkan buruknya kesejahteraan masyarakat.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin Terbanyak di Lampung Tahun 2014

| No. | Kabupaten | Penduduk Miskin (%) |
|-----|-----------------|---------------------|
| 1 | Lampung Utara | 23,67 |
| 2 | Pesawaran | 17,86 |
| 3 | Lampung Timur | 17,38 |
| 4 | Lampung Selatan | 17,09 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Lampung Timur, 2014

Berdasarkan tabel 1, persentase penduduk miskin terbanyak di Lampung adalah Kabupaten Lampung Timur, dimana Kabupaten ini berada di peringkat ketiga kategori persentase penduduk miskin terbanyak di Provinsi Lampung setelah Lampung Utara dan Pesawaran. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung Timur Ir.Anwar menyatakan bahwa program pengentasan kemiskinan di daerah ini hingga sekarang belum mencapai sasaran, hal itu disebabkan belum adanya komitmen yang kuat dari pemerintah daerah untuk mengimplementasikan program pengentasan masyarakat dari kemiskinan yang ditegaskan oleh pemerintah pusat (Badan Pusat Statistik Lampung Timur, 2014).

Beberapa bidang yang perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah adalah pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, dan kondisi lingkungan. Apabila bidang-bidang ini mendapat prioritas dalam pembangunan daerah maka dapat diharapkan IPM (indikator yang mengukur pencapaian suatu daerah dalam tiga dimensi dasar pembangunan manusia: lamanya hidup, pengetahuan, dan standar hidup yang layak) Lampung Timur dapat lebih baik secara mutlak maupun peringkat. Oleh karena itu, sentuhan "tangan dingin" kepala daerah perempuan pertama di Lampung dan Sumatera ini benar-benar akan dinantikan untuk dapat menyelesaikan sejumlah permasalahan serius di daerah ini, seperti kemiskinan yang berkorelasi dengan tingginya angka kriminalitas.¹

Pembangunan ekonomi lokal diperlukan adanya peranan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja untuk mewujudkan perekonomian daerah, dimana peranan pemerintah disini adalah untuk memutuskan kebijakan-kebijakan yang memberikan iklim kondusif untuk dunia usaha. Pemerintah daerah mempunyai tujuan untuk mengurangi dispersi atau ketimpangan pembangunan antara daerah dan sub daerah serta antara warga masyarakat melalui pembangunan ekonomi lokal. Tujuan tersebut yaitu memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah dan mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi berkelanjutan.

¹ <http://kenali.co/berita-1206-kiprah-chusnunia-bupati-perempuan-pertama-di-sumatera.html>. Diakses Penulis pada 24 Juli 2017

Kelurahan Cipageran Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi selain fokus pada pengembangan sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM), Pemerintah Kota Cimahi juga mengembangkan *cluster* usaha terpadu sesuai dengan potensi kearifan lokal yaitu sentra pengolahan susu. Program tersebut bekerjasama dengan sejumlah lembaga pendidikan tinggi dan kementerian pertanian. Selain dari sisi pertanian peternakan, hasil susu ini dikembangkan menjadi usaha produktif (Bappeda Cimahi, 2014). Program sentra pengolahan susu di sana telah nyata memberikan manfaat kepada masyarakat. Mereka diberi ilmu pengolahan susu, dari susu murni biasa, masyarakat diajarkan untuk bisa menyulap susu menjadi keju, sabun susu, yoghurt, kerupuk, karamel hingga kue susu. Keberhasilan pengembangan sentra susu dan olahan susu sapi di Cipageran Cimahi Utara ini berbasis pendekatan sosial. Kemudian hasil dari olahan susu, awalnya hanya ada 1 jenis produk berupa susu saja yang dijual. Kini ada lebih dari 10 jenis produk yang laku dijual, mulai dari sabun, susu, kue hingga kerupuk. Populasi sapi yang ditenak juga mengalami peningkatan yang signifikan, selain itu harga jual susu pun meningkat tajam. Dengan kondisi ini, sentra susu tentu bisa ikut menjadi penggerak bagi kebangkitan UMKM.

Melihat keberhasilan program sentra pengolahan susu di daerah Cimahi, tentu dapat menghasilkan ratusan pengusaha baru sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan. Jika wirausahawan baru terus bertambah, pada gilirannya akan menyerap tenaga kerja baru yang kemudian mereka akan menjadi lokomotif percepatan usaha bagi yang lainnya. Pembangunan ekonomi lokal merupakan bagian dari usaha nasional yang membutuhkan banyak tenaga kerja yang

dimana pada pembangunan ekonomi lokal tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi rakyat. Hal pokok yang menjadi pertimbangan pengembangan ekonomi lokal di suatu daerah adalah mengupayakan agar wilayah dapat tumbuh dan berkembang secara mandiri berdasarkan potensi sosial ekonomi dan karakteristik spesifik yang dimilikinya. Konteks pengembangan sosial ekonomi dalam jangka panjang, dengan arah yang dituju dalam pengembangan suatu wilayah karena itu wilayah tersebut harus mandiri dan berdaya saing sehingga mampu berintegrasi ke dalam sistem perekonomian regional, nasional, maupun global.

Berdasarkan hasil *pra-survey* yang telah dilakukan menunjukkan beberapa masalah, yaitu:

1. Minimnya lapangan pekerjaan yang membuat pengangguran semakin meningkat.
2. Adanya komunitas-komunitas atau kelompok-kelompok industri yang tidak terkondisikan dengan baik, mereka sudah mampu menghasilkan produk rumahan tetapi masih minimnya pengetahuan mereka dalam proses pemasaran sehingga kelompok industri tersebut tidak hidup.
3. Keterbatasan anggaran dari pemerintah daerah untuk memfasilitasi jalannya pembangunan ekonomi lokal.
4. Kurangnya partisipasi masyarakat yang sulit berfikir maju, mereka tidak bisa memanfaatkan sumber daya yang ada di daerah.

Mengacu pada permasalahan tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil Mengengah dan Tenaga Kerja Lampung Timur kemudian memberdayakan masyarakat daerah untuk pembangunan ekonomi lokal melalui “Program Malu Menganggur” dimana program ini mempunyai tujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran dengan menciptakan tenaga kerja mandiri dan lapangan pekerjaan rumahan (*home industry*) dengan memanfaatkan potensi yang ada pada daerah yang akan diberikan program tersebut. Sosialisasi dan pelatihan terkait Program Malu Menganggur ini akan dilaksanakan di 24 Kecamatan di Kabupaten Lampung Timur, sementara pelatihan yang sudah dilakukan yaitu di Kecamatan Jabung dan Kecamatan Purbolinggo.

Jika dilihat dari standar dan sasaran kebijakan, pelaksanaan program sudah sesuai, hanya saja masih banyak masyarakat yang belum mengetahui secara transparan tentang tenaga kerja mandiri, sehingga pelaksanaan program hanya dari pengetahuan yang disampaikan oleh implementor saja. Kemudian dalam sumber daya belum memadai, masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program dan belum adanya anggaran dana khusus untuk pelaksanaan kegiatan Program Malu Menganggur. Selain itu, komunikasi antar organisasi cukup mendukung dilihat dari *output* Program Malu Menganggur. Dalam kondisi lingkungan sosial, politik, dan ekonomi, masyarakat mendukung pelaksanaan program. Namun, dalam pelaksanaannya partisipasi masyarakat masih rendah sehingga ketercapaian pelaksanaan program belum maksimal.

Hasil wawancara dengan Bapak Bachtiar Hudi selaku Koordinator pelaksana kegiatan Program Malu Menganggur, Kecamatan Purbolinggo merupakan salah satu contoh daerah yang cukup berhasil melaksanakan Program Malu Menganggur terlihat dari peran dan antusias, mereka membentuk komunitas yang beranggotakan ibu-ibu rumah tangga dan pemuda Kecamatan Purbolinggo. Mereka bekerjasama dalam pelaksanaan program tersebut, ibu-ibu rumah tangga mengerjakan *home industry* seperti pembuatan keripik singkong, kelanting, bahkan sampai membatik. Kemudian pemuda-pemuda yang memasarkan produk dan melakukan kerjasama dengan salah satu pusat oleh-oleh di jalan Lintas Timur. Tetapi jika dilihat dari pelaksanaannya, tidak semua program berjalan dengan baik, seperti yang terjadi di Kecamatan Jabung yaitu keterbatasan dana dari pemerintah, kurang pemahannya masyarakat dalam konsep tenaga kerja mandiri, dan keadaan sumber daya yang tidak menentu (Hasil wawancara, 08 Agustus 2017).

Bapak Bachtiar Hudi menegaskan keterbatasan dana menjadi kendala dalam memaksimalkan pelaksanaan program dimana pemerintah hanya mengalokasikan dana pada saat pelatihan program, kemudian masyarakat tidak mempunyai modal untuk menghasilkan produk dalam waktu jangka panjang. Kurang pemahannya masyarakat dalam manajemen pemasaran, mereka belum paham jika memasarkan produk perlu menganalisa permintaan pasar, dimana permintaan pasar mempengaruhi pencapaian sasaran.

Penelitian Ani (2017) tentang Implementasi Program Jaring (Jangkau, Sinergi dan *Guideline*), memaparkan bahwa pelaksanaan Program Jaring sudah berjalan dengan cukup efektif walaupun masih ditemukan sedikit kendala serta masalah dalam pelaksanaannya. Kendala dalam program ini adalah keterbatasan sumber daya manusia yang masih harus mengalami perbaikan dari segi kuantitas, dan terkait dengan finansial sumber daya juga masih perlu mendapatkan perhatian lebih, karena keterbatasan anggaran dari pemerintah yang sangat minim. Melihat hasil *pra-survey* dan penelitian Ani (2017) bahwa dalam pelaksanaan program sejenis dan secara khusus Program Malu Menganggur terdapat kendala yaitu keterbatasan anggaran. Namun, perbedaan kendala dari penelitian terdahulu adalah partisipasi masyarakat, rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai manajemen pemasaran dan sumber daya alam yang tidak menentu.

Berdasarkan pemaparan tersebut terlihat bahwa pelaksanaan Program Malu Menganggur belum terealisasikan dengan baik. Program yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja perlu ditinjau kembali pelaksanaannya sebagai masalah yang perlu dicarikan solusi efektifnya agar pelaksanaan Program Malu Menganggur dapat berjalan dari tahun ketahun. Untuk itulah peneliti telah melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“Implementasi Program Malu Menganggur oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Lampung Timur (Studi Kasus di Kecamatan Jabung dan Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah implementasi Program Malu Menganggur oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Timur di Kecamatan Jabung dan Kecamatan Purbolinggo?
2. Apa saja hambatan-hambatan dalam implementasi Program Malu Menganggur oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Timur di Kecamatan Jabung dan Kecamatan Purbolinggo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diangkat, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis implementasi Program Malu Menganggur oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Timur di Kecamatan Jabung dan Kecamatan Purbolinggo.
2. Untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam implementasi Program Malu Menganggur oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Timur di Kecamatan Jabung dan Kecamatan Purbolinggo.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, informasi, dan pengetahuan dalam kekayaan perkembangan ilmu

administrasi publik, khususnya yang berkaitan dengan implementasi kebijakan publik.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan-masukan bagi para pemangku kepentingan, khususnya bagi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Timur dalam pelaksanaan Program Malu Menganggur.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Kebijakan Publik

1. Konsep Kebijakan Publik

Menurut Thomas Dye kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan. Definisi kebijakan publik dari Thomas Dye tersebut mengandung makna bahwa kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta. Dalam pemahaman bahwa “keputusan” termasuk juga ketika pemerintah memutuskan untuk “tidak memutuskan” atau memutuskan untuk “tidak mengurus” suatu isu (Suharno, 2013: 11).

Menurut W.I. Jenkins (1978) kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi dimana keputusan-keputusan itu pada prinsipnya berada dalam batas-batas kekuasaan dari para aktor tersebut (Sulistio, 2009: 3).

Menurut Irfan Islamy kebijakan publik merupakan sebuah serangkaian suatu tindakan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang memiliki suatu tujuan atau berorientasi pada suatu tujuan dalam kepentingan semua masyarakat, dimana dalam kebijakan publik dibuat benar-benar atas nama sebuah kepentingan publik, untuk mengatasi masalah dan dalam memenuhi keinginan dan tuntutan semua anggota masyarakat (Sulistio, 2009: 3)

Berdasarkan pengertian beberapa ahli di atas, penulis menyimpulkan kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya menyejahterakan masyarakat, atau segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi permasalahan-permasalahan publik.

2. Proses Kebijakan Publik

Proses kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politik tersebut nampak dalam serangkaian kegiatan adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan. Sedangkan aktivitas perumusan masalah, *forecasting*, rekomendasi kebijakan *monitoring* dan evaluasi kebijakan adalah aktivitas yang lebih bersifat intelektual (Suharno, 2013: 22).

Menurut Michael Howlet dan M. Ramesh proses kebijakan publik terdiri dari lima tahapan (Suharno, 2013: 26), yaitu:

- a. Penyusunan agenda, yakni suatu proses agar suatu masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah.
- b. Formulasi kebijakan, yakni proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah.
- c. Pembuatan kebijakan, yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan.
- d. Implementasi kebijakan, yaitu proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil.
- e. Evaluasi kebijakan, yakni proses untuk memonitor dan menilai hasil atau kinerja kebijakan.

3. Tahap-tahap Kebijakan Publik

Pada pembuatan kebijakan terdapat tahap-tahap yang harus dilewati agar suatu kebijakan dapat disusun dengan baik. Menurut Ripley terdapat empat tahap kebijakan publik (Suharno, 2013: 24-25), yaitu:

a. Tahap Penyusunan Agenda Kebijakan

Pada tahap ini ada 3 kegiatan yang perlu dilaksanakan, yaitu:

1. Membangun persepsi di kalangan *stakeholder* bahwa sebuah fenomena benar-benar dianggap sebagai masalah.
2. Membuat batasan masalah bahwa tidak semua masalah harus masuk dalam penyusunan agenda kebijakan dan memiliki tingkat urgensi yang tinggi, sehingga perlu dilakukan pembatasan terhadap masalah-masalah tersebut.

3. Memobilisasi dukungan agar masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah dengan cara mengorganisir kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat dan kekuatan-kekuatan politik, publikasi melalui media massa dan sebagainya.

b. Tahap Formulasi dan Legitimasi Kebijakan

Pada tahap analisis kebijakan perlu mengumpulkan dan menganalisis informasi yang berhubungan dengan masalah yang bersangkutan, kemudian berusaha mengembangkan alternatif-alternatif kebijakan, membangun dukungan dan melakukan negosiasi, sehingga sampai pada sebuah kebijakan yang dipilih.

c. Tahap Implementasi Kebijakan

Pada tahap ini perlu memperoleh dukungan sumber daya, dan penyusunan organisasi pelaksana kebijakan. Dalam proses implementasi sering ada mekanisme insentif dan sanksi agar implementasi kebijakan tersebut berjalan dengan baik.

d. Tahap Evaluasi terhadap Implementasi, Kinerja dan Dampak Kebijakan

Tindakan (implementasi) kebijakan akan dihasilkan kinerja dan dampak kebijakan, yang memerlukan proses berikutnya yakni evaluasi. Hasil evaluasi tersebut berguna bagi penentuan kebijakan baru di masa yang akan datang, agar kebijakan yang akan datang lebih baik dan berhasil.

B. Tinjauan tentang Implementasi Kebijakan

1. Konsep Implementasi Kebijakan

Menurut Merille S. Grindle implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah bersangkut-paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan (Sulistio, 2009: 38).

Menurut Wahab implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan (Sahya, 2012: 530). Ukuran keberhasilan maupun kegagalan dari suatu kebijakan sebagian besar ditentukan dari implementasi rencana yaitu 20% keberhasilan, implementasi adalah 60%, sisanya 20% adalah bagaimana kita mengendalikan implementasi. Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat, karena di sini masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep, muncul di lapangan.

Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah adanya pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input, implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, kemudian program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap untuk proses pelaksanaannya dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran atau tujuan kebijakan yang diinginkan (Abdullah, 1988: 398).

Berdasarkan pengertian implementasi kebijakan dari beberapa ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu rangkaian aktifitas dari berbagai aktor dan organisasi pada proses implementasi kebijakan yang dapat dimulai dari tujuan-tujuan kebijakan yang telah ditetapkan dan program-program yang telah dibuat guna meraih tujuan yang diinginkan.

2. Model-model Implementasi Kebijakan Publik

Sebagai salah satu bidang kajian yang dinamis, studi implementasi senantiasa terus mengalami perkembangan dari masa ke masa. Melacak dari berbagai literatur dan hasil penelitian yang telah dihasilkan oleh para peneliti sebelumnya, studi implementasi telah melahirkan banyak publikasi yang berusaha untuk memahami fenomena implementasi, baik yang bersifat deskriptif maupun berupa model-model dalam mengimplementasikan suatu kebijakan (Sulistio, 2009: 44). Model-model implementasi tersebut yaitu:

A. Model *Top-Down Approach* (Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn)

Menurut Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn dibutuhkan syarat-syarat untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara sempurna (Sulistio, 2009: 44). Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh instansi pelaksana akan menimbulkan kendala atau gangguan yang serius, jika berada di

luar kendali implementor (dapat bersifat politik, sosial dan ekonomi, budaya dan lain-lain)

2. Tersedianya waktu dan sumberdaya yang memadai
3. Perpaduan sumberdaya yang dibutuhkan benar-benar ada
4. Kebijakan itu dipengaruhi oleh adanya hubungan kausalitas yang handal
5. Hubungan kausalitas harus bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya
6. Hubungan ketergantungan harus kecil
7. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan
8. Tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat
9. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna
10. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan

B. Model Van Meter dan Van Horn

Menurut Van Meter dan Van Horn terdapat enam variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan (Suharno, 2013: 176).

Variabel-variabel tersebut yaitu:

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur, karena ketidakjelasan standar dan sasaran kebijakan berpotensi untuk menimbulkan multiinterpretasi yang akhirnya akan berimplikasi pada sulitnya implementasi kebijakan. Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan.

Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multi interpretasi dan mudah menimbulkan konflik di antara para agen implementasi.

2. Sumber Daya

Implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya non-manusia. Kurangnya sumber daya akan menyulitkan implementasi kebijakan. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Yang dimaksud karakteristik agen pelaksana adalah mencakup birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi kebijakan.

4. Disposisi Implementor

Disposisi implementor ini mencakup tiga hal yang penting, yaitu:

- a. Respons implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan
- b. Kognisi, yaitu pemahamannya terhadap kebijakan,
- c. Intensitas disposisi implementor, yaitu preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor kebijakan. Se jauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan.

5. Komunikasi Antar Organisasi

Jalinan hubungan kerjasama yang sinergis diperlukan antar instansi terkait untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.

6. Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik

Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Se jauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan. Karakteristik partisipan yaitu mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan, dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

C. Model Merilee S. Grindle (1980)

Menurut Merilee S. Grindle terdapat dua variabel besar yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu isi kebijakan dan lingkungan implementasi (Suharno, 2013: 172). Variabel isi kebijakan mencakup beberapa hal, yaitu:

1. Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau *target groups* termuat dalam isi kebijakan
2. Jenis manfaat yang diterima oleh *target group*
3. Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan
4. Apakah letak sebuah program sudah tepat
5. Apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementor dengan rinci
6. Apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai

Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup:

1. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan
2. Karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa
3. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

D. Model Implementasi Kebijakan Edwards III

George C. Edwards mengemukakan bahwa implementasi kebijakan akan berhasil apabila terdapat empat faktor kritis yang mendukung,

yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap, dan struktur birokrasi (Suharno, 2013: 170). Untuk memperjelas setiap variabel tersebut, George C. Edwards dalam Suharno mengemukakan sebagai berikut:

1. Komunikasi

Untuk menjamin keberhasilan implementasi kebijakan, pelaksana harus mengetahui betul apa yang harus dilakukannya berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan tersebut. Selain itu, kelompok sasaran kebijakan juga harus diinformasikan mengenai apa saja yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan, karena penting untuk menghindari adanya resistensi dari kelompok sasaran.

2. Sumber Daya

Keberhasilan implementasi kebijakan juga ditentukan oleh sumber daya yang dimiliki oleh implementor. Tanpa sumber daya yang memadai, tentu implementasi kebijakan tidak akan berjalan secara optimal. Sumber daya sebagai pendukung implementasi kebijakan dapat berwujud sumber daya manusia yaitu kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

3. Disposisi

Disposisi disini menyangkut watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis dan sebagainya. Apabila implementor memiliki

disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik sebagaimana yang diharapkan oleh pembuat kebijakan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan struktur organisasi yang bertugas untuk mengimplementasikan kebijakan, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan diperlukan sebuah prosedur operasional yang standar (*Standar Operational Procedures* atau SOP). SOP diperlukan sebagai pedoman operasional bagi setiap implementor kebijakan.

Berdasarkan pemaparan model-model di atas, peneliti mengadopsi model implementasi kebijakan yang telah dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn, konsep inilah yang akan digunakan penulis di lapangan untuk menganalisis implementasi Program Malu Mengganggu oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Timur. Pada model ini penulis menggunakan variabel standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, disposisi implementor, komunikasi antar organisasi, dan kondisi lingkungan ekonom, sosial dan politik.

Alasan penulis menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn sebagai fokus penelitian, karena adanya fenomena atau gejala-gejala pada penelitian yang sesuai dengan variabel-variabel yang

ada dalam model implementasi tersebut. Peneliti dapat melihat dan mengukur tingkat keberhasilan Program Malu Menganggur melalui variabel-variabel pada model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn.

C. Tinjauan tentang Pembangunan Ekonomi Lokal

1. Konsep Pembangunan Ekonomi Lokal

Pengembangan ekonomi lokal adalah suatu proses yang melibatkan pembentukan kelembagaan baru, perkembangan industri baru, pengembangan kapasitas pekerja untuk menghasilkan produk yang lebih bermutu, identifikasi pasar baru serta pendirian usaha-usaha baru (Nurzaman, 2002: 39).

Peranan pemerintah daerah dalam pengembangan ekonomi lokal sangat penting, dalam hal ini pemerintah daerah berperan menjalankan fungsinya sebagai pelopor pengembangan, koordinator, fasilitator, dan stimulator. Peranan pemerintah daerah juga sangat diperlukan dalam hal memperhatikan infrastruktur yang digunakan dalam kegiatan bisnis dan industri, serta peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Selain pemerintah daerah, peranan swasta dan kelompok masyarakat juga diperlukan dalam kegiatan manajemen wilayah dan pencarian solusi atas permasalahan tertentu. Sementara itu, salah satu kebijaksanaan pembangunan ekonomi lokal didasarkan pada prinsip keuntungan kompetitif, salah satunya melalui pengembangan potensi ekonomi daerah (Sjafrizal, 2008: 237).

Potensi ekonomi daerah didefinisikan sebagai kemampuan ekonomi yang ada di daerah yang mungkin dan layak dikembangkan sehingga akan terus berkembang menjadi sumber penghidupan rakyat setempat bahkan dapat mendorong perekonomian daerah secara keseluruhan untuk berkembang dengan sendirinya dan berkesinambungan (Suparmoko, 2002: 59)

Jadi, pembangunan ekonomi lokal adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan mengembangkan kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah.

D. Tinjauan tentang Program Malu Menganggur

1. Konsep Program Malu Menganggur

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor B.1014.D/09/SK/2016 tentang Penetapan Penyuluh dan Koordinator Penyuluh Tenaga Kerja Mandiri Kabupaten Lampung Timur, bahwa dalam rangka upaya penciptaan usaha mandiri guna mengurangi jumlah pencari kerja melalui Program Malu Menganggur pada Program Tenaga Kerja Mandiri (TKM), maka dipandang perlu untuk menetapkan penyuluh dan koordinator penyuluh TKM Kabupaten Lampung Timur. Penyuluh TKM bertugas menyampaikan informasi dan pengetahuan umum dan pengetahuan teknis, pembinaan, pendampingan dan fasilitasi kepada

pencari kerja dan pelaku usaha mandiri dan usaha kecil menengah, industri kecil dan sejenisnya.

Sebagai perluasan kesempatan kerja dan pengembangan usaha mandiri, Program Malu Menganggur merupakan suatu program tenaga kerja mandiri untuk memberdayakan masyarakat dari pemerintah daerah Kabupaten Lampung Timur melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja yang memberikan pelatihan khusus untuk membuat produk dan memasarkan produk rumahan dengan membentuk kelompok-kelompok industri yang diharapkan menjadi cikal bakal usaha kecil mikro dan menengah di bidang perekonomian. Program ini diarahkan pada pemanfaatan potensi daerah dalam rangka pemberdayaan masyarakat pedesaan yang berbasis sumber daya lokal.

2. Tujuan Program Malu Menganggur

- a. Mengentaskan kemiskinan dan pengangguran
- b. Melatih keterampilan warga yang belum memiliki pekerjaan
- c. Menciptakan kreatifitas maupun inovasi yang dapat mewujudkan masyarakat mandiri
- d. Menciptakan industri kecil yang berkelanjutan

3. Sasaran Program Malu Menganggur

Sasaran yang akan diperoleh dari Program Malu Menganggur melalui pola pemberdayaan kelompok masyarakat adalah:

- a. Terbukanya peluang usaha

- b. Berkembangnya usaha kelompok, meningkatnya pendapatan dan tercapainya kesejahteraan kelompok sasaran dan masyarakat pada umumnya
- c. Meningkatnya kemandirian kelompok

4. Target Program Malu Menganggur

- a. Masyarakat menganggur dan pemuda binaan terampil dan professional dalam melakukan usaha *home industry*
- b. Memasarkan produk *home industry* sebagai oleh-oleh khas Lampung
- c. Terciptanya wadah kelompok usaha mandiri yang berbasis sumber daya lokal

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu jenis penelitian yang berupaya menggambarkan suatu fenomena yang ada dengan jalan memaparkan data secara kata-kata, dan gambar (Moleong, 2012: 6). Sementara pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu peneliti yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Peneliti menggunakan metode tersebut untuk mendeskripsikan dan memperoleh pemahaman menyeluruh dan mendalam tentang implemementasi Program Malu Menganggur oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Timur.

B. Fokus Penelitian

Pada dasarnya penentuan masalah menurut Lincoln dan Guba adalah bergantung pada paradigma apakah yang dianut oleh seorang peneliti, yaitu

apakah ia sebagai peneliti, evaluator, ataukah sebagai peneliti kebijakan (Moleong, 2012: 93). Pada model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, peneliti melihat dari beberapa variabel, yaitu:

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan meliputi apakah sasaran penerima kebijakan, dalam hal ini penerima Program Malu Mengganggu sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, serta apakah standar kebijakan pelaksanaan Program Malu Mengganggu jelas dan terukur sehingga implementasi dapat berjalan dengan baik.

2. Sumber Daya

Sumber daya menjadi faktor pendukung implementasi kebijakan, baik dari sumber daya manusia maupun sumber daya non-manusia yang berkenaan dengan ketersediaan staf/tenaga kerja, informasi, kewenangan, dan fasilitas. Dalam hal ini peneliti akan menganalisis keahlian dan kemampuan implementor dalam melaksanakan tugas, serta ketersediaan sarana dan prasarana dalam implementasi.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Berkenaan dengan struktur organisasi yang menentukan bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal, dalam hal ini peneliti akan menganalisis bagaimana struktur dalam pelaksanaan Program Malu Mengganggu, apakah dapat berjalan efektif dan efisien, dan kesesuaian pembagian kerja.

4. Disposisi Implementor

Dalam implementasi kebijakan, sikap atau disposisi implementor dibedakan menjadi tiga hal, yaitu:

- a. Respons implementor terhadap kebijakan, yang terkait dengan kemauan implementor untuk melaksanakan kebijakan publik.
- b. Kognisi, yaitu pemahaman terhadap kebijakan yang telah ditetapkan.
- c. Intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, dan karakteristik para partisipan.

5. Komunikasi Antar Organisasi

Implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Koordinasi dan kerjasama antar instansi sangat diperlukan bagi keberhasilan suatu program. Berkenaan dengan kerjasama para implementor dalam pelaksanaan Program Malu Menganggur, baik dengan Dinas terkait yaitu Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Lampung Timur, serta instansi-instansi kesehatan dan pendidikan.

6. Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik

Hal ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan yaitu mendukung

atau menolak, serta sifat opini publik yang ada di lingkungan, serta apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

Variabel ataupun indikator yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn merupakan variabel yang bisa menjelaskan secara konkret dalam menjelaskan proses implementasi kebijakan yang sebenarnya. Sehingga jika dilihat secara keseluruhan pada model ini bukan hanya menekankan pada implementatornya saja atau masyarakat sebagai penerima pelayanan saja, namun keduanya yang terlibat sebagai aktor kebijakan akan dilihat sehingga dapat dianalisis apa yang menyebabkan sebuah kendala dalam suatu penelitian.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian dalam melihat fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Penetapan penelitian ditentukan secara *purposive* atau berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan tujuan penelitian. *Purposive* adalah lokasi penelitian dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu dan diambil berdasarkan tujuan penelitian (Sugiyono, 2013: 108). Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Lampung Timur. Peneliti mengambil lokasi di Kecamatan Jabung dan Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur karena di Dua Kecamatan tersebut dapat dijadikan perbandingan tingkat keberhasilan pelaksanaan program.

D. Informan Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menentukan informan dengan pihak yang terkait dan dinilai memiliki informasi tentang pelaksanaan Program Malu Menganggur melalui wawancara yang bertindak sebagai perencana dan pelaksana dalam pengumpulan data, melakukan analisis, menafsirkan dan melakukan laporan implementasi Program Malu Menganggur. Peneliti mewawancarai informan dan mencatat berbagai informasi yang berkaitan dengan masalah tentang implementasi Program Malu Menganggur di Kecamatan Jabung dan Kecamatan Purbolinggo. Kemudian, peneliti menggunakan beberapa alat untuk mendukung dan memperlancar penelitian, yaitu pedoman wawancara, alat tulis kerja (ATK), *voice recorder*, kamera dan laptop. Pada penelitian ini, informan yang telah peneliti wawancarai adalah:

Tabel 2. Informan Penelitian

| No. | Nama | Jabatan | Tanggal Wawancara |
|-----|----------------------|--|-------------------|
| 1. | Sudian Leri Setiawan | Kepala Bidang Tenaga Kerja Lampung Timur | 21 Oktober 2017 |
| 2. | Bachtiar Hudi | Koordinator Pelaksana Kegiatan Program Malu Menganggur | 24 Oktober 2017 |
| 3. | Yana | Fasilitator Kegiatan Program Malu Menganggur Kecamatan Jabung | 17 Oktober 2017 |
| 4. | Susi | Fasilitator Kegiatan Program Malu Menganggur Kecamatan Purbolinggo | 24 Oktober 2017 |
| 5. | Ali Fatan | Pendamping Kegiatan Program Malu Menganggur Kecamatan Jabung | 29 Oktober 2017 |
| 6. | Fitria Susanti | Pendamping Kegiatan Program Malu Menganggur Kecamatan Purbolinggo | 24 Oktober 2017 |
| 7. | Umsi | Ketua Pokja III PKK Kecamatan Purbolinggo | 24 Oktober 2017 |
| 8. | Giarti | Masyarakat Kecamatan Purbolinggo | 24 Oktober 2017 |
| 9. | Lastri | Masyarakat Kecamatan Purbolinggo | 24 Oktober 2017 |
| 10. | Erna | Masyarakat Kecamatan Purbolinggo | 18 November 2017 |
| 11. | Wawan | Masyarakat Kecamatan Jabung | 29 Oktober 2017 |
| 12. | Umi | Masyarakat Kecamatan Jabung | 21 November 2017 |
| 13. | Nanang | Masyarakat Kecamatan Jabung | 21 November 2017 |

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2017

E. Sumber Data

Sumber data adalah bahan keterangan tentang suatu objek penelitian yang lebih menekankan pada aspek materi. Menurut Lofland dan Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Moleong, 2012: 157). Sumber data di dalam penelitian merupakan faktor yang sangat penting, karena sumber data akan menyangkut kualitas dari hasil penelitian. Pada penelitian ini, penulis menggunakan dua macam data berdasarkan jenis dan sumber datanya, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber pertama yang diperoleh melalui wawancara terhadap informan yang ditemui di lapangan. Dalam hal ini, berupa data dan informasi hasil wawancara dengan pihak yang menjadi pelaksana Program Malu Menganggur. Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive*, yaitu dilakukan sesuai dengan kebutuhan peneliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, arsip, serta data dan informasi lainnya yang ada hubungannya dengan Program Malu Menganggur. Data sekunder diperoleh dari hasil laporan tertulis (penelaahan dokumen) instansi terkait dalam hal ini Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Lampung Timur,

pengumpulan literatur, karya-karya tulis serta surat keputusan yang berhubungan dengan permasalahan Program Malu Mengganggu.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang paling independen terhadap semua teknik pengumpulan data dan teknik analisis data adalah wawancara (*interview*), observasi dan dokumentasi. Teknik-teknik tersebut yaitu:

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data, dimana pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan subjek penelitian atau responden. Pada penelitian ini peneliti telah melakukan wawancara mengenai pelaksanaan Program Malu Mengganggu dengan Unit Pengelola Kegiatan dan masyarakat penerima program.

2. Observasi

Observasi dalam teknik ini adalah pengamatan dari peneliti terhadap objek penelitiannya. Peneliti dapat mengumpulkan data ketika peristiwa terjadi dan dapat datang lebih dekat untuk meliput seluruh peristiwa. Instrumen yang digunakan adalah dapat berupa lembar pengamatan, panduan pengamatan maupun alat perekam. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian yang berkaitan dengan implementasi Program Malu Mengganggu oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Lampung Timur.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen berupa studi kepustakaan yakni menelusuri, mengumpulkan, dan mencatat data tertulis dan keterangan ilmiah dari buku-buku, jurnal-jurnal dan dokumen yang berisikan peraturan, hukum, pendapat-pendapat, teori-teori dari para ahli yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan (Sugiyono, 2013: 329). Dokumen dalam penelitian tentang implementasi Program Malu Mengganggu dapat berupa surat keputusan, foto, gambar dan data-data mengenai implementasi Program Malu Mengganggu, serta informasi mengenai implementasi Program Malu Mengganggu yang telah dilaksanakan di Kabupaten Lampung Timur.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan teknik menghubungkan data yang diperoleh peneliti sebelum, selama dan setelah dilaksanakan penelitian. Analisis data dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan penelitian (Sugiyono, 2013: 336). Analisis data dalam penelitian ini adalah proses menyusun data yaitu, mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola atau kategori agar dapat ditafsirkan, yang dilakukan melalui tiga macam kegiatan yang saling berhubungan dan berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah analisis data yang dilakukan dengan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan

polanya. Data yang diperoleh di dalam lapangan ditulis/diketik dalam bentuk laporan yang terperinci. Dalam penelitian ini peneliti memilah, membuang data yang tidak sesuai dengan fokus peneliti, dan mencatat serta merangkum bagian bagian yang sesuai dalam fokus penelitian yaitu tentang implementasi Program Malu Mengganggu oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Lampung Timur sehingga kesimpulan akhir mengenai implementasi Program Malu Mengganggu tersebut dapat ditemukan dengan mudah oleh peneliti.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah *mendisplaykan* data, melalui penyajian data, data dapat terorganisasikan. Pada penelitian ini, data ditampilkan dalam bentuk uraian, tabel, gambar atau foto. Tetapi yang paling banyak digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian ini adalah dengan tabel dan teks naratif.

3. Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan kegiatan analisis data yang dimaksudkan untuk mencari makna dan membuat kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan dengan mencari pola, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul dan hipotesis kerja. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal ataupun tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

H. Teknik Keabsahan Data

Untuk menetapkan keabsahan data, diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu (Moleong, 2012: 324). Ada tiga kriteria yang digunakan dalam penelitian, yaitu:

1. Derajat Kepercayaan (*credibility*)

Setiap penelitian harus memiliki kredibilitas sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Kredibilitas penelitian kualitatif adalah keberhasilan mencapai maksud mengeksplorasi masalah yang majemuk atau keterpercayaan terhadap hasil data penelitian. Penjaminan keabsahan data melalui derajat kepercayaan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan cara triangulasi sumber yakni dengan membandingkan data hasil wawancara dengan sumber yang berbeda (informan yang berbeda) dan membandingkan dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Data dari beberapa sumber tersebut kemudian dikategorisasikan mana pandangan yang sama, mana pandangan yang berbeda dan mana yang spesifik. Peneliti melakukan triangulasi hasil wawancara dengan tim penyuluh dan panitia pelaksana pelatihan Program Malu Menganggur. Lalu peneliti juga melakukan triangulasi data dari sumber wawancara dan dokumentasi di lapangan.

2. Keteralihan (*Transferability*)

Keteralihan berbeda dengan validitas eksternal dari nonkualitatif. Konsep validitas itu menyatakan bahwa generalisasi suatu penemuan dapat

berlaku atau diterapkan pada semua konteks dalam populasi yang sama atas dasar penemuan yang diperoleh pada sampel yang secara representatif mewakili populasi itu. Dalam penelitian ini, peneliti mendeskripsikan hasil data yang diperoleh, baik berupa hasil wawancara, hasil dokumentasi, maupun hasil observasi secara transparan dengan menguraikannya secara rinci, yaitu melaporkan hasil penelitian dengan menggambarkan konteks tempat penelitian diselenggarakan. Pemaparan tersebut berada pada bab hasil dan pembahasan, dimana pemaparan secara keseluruhan data tersebut dilakukan agar pembaca dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan program dan faktor penghambat pada pelaksanaan program.

3. Kebergantungan (*Dependability*)

Kebergantungan merupakan substitusi istilah reliabilitas dalam penelitian yang nonkualitatif. Pada penelitian kualitatif, uji kebergantungan dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian pengulangan suatu studi dalam tiga kali dengan kondisi yang sama. Persoalan yang sulit dicapai dalam penelitian ini adalah mencari kondisi yang benar-benar sama dengan hasil penelitian dan fenomena yang terjadi di lapangan.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Lampung Timur

1. Profil Wilayah Kabupaten Lampung Timur

Kabupaten Lampung Timur merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Lampung. Kabupaten Lampung Timur dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, diresmikan pada tanggal 27 April 1999, dengan Ibu Kota di Sukadana.



Gambar 1. Peta Wilayah Kabupaten Lampung Timur

Sumber: www.kabupatenlampungtimur.go.id

Secara administratif batas-batas wilayah Kabupaten Lampung Timur adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Rumbia, Seputih Surabaya dan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, serta Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Jawa (wilayah laut Provinsi Banten dan DKI Jakarta).
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang, Ketibung, Palas, dan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bantul dan Metro Raya Kota Metro, serta Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.

2. Visi dan Misi Kabupaten Lampung Timur

a. Visi

Lampung Timur sejahtera, berdaya saing, religius dan berkelanjutan.

b. Misi

1. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lampung Timur
2. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) secara mantap dan harmonis berlandaskan tata peraturan pemerintahan yang berlaku
3. Mewujudkan kualitas infrastruktur wilayah yang mendukung pembangunan daerah dan nasional

4. Membangun pendidikan, penguasaan IPTEKS, dan kesehatan.
5. Mewujudkan ketentraman dan Ketertiban Masyarakat serta mendukung penegakan supremasi hukum
6. Membangun masyarakat religius, berbudi luhur, dan berbudaya, serta melestarikan dan mengembangkan budaya daerah
7. Mengoptimalkan sumberdaya alam daerah berbasiskan pada keberlanjutan dan kelestarian lingkungan hidup

3. Demografi Kabupaten Lampung Timur

Salah satu ciri pokok penduduk di negara berkembang seperti Indonesia, selain jumlahnya besar, secara geografis penyebarannya tidak merata. Kabupaten Lampung Timur dengan luas wilayah sekitar 15% dari total wilayah Provinsi Lampung memiliki ciri yang sama. Persebaran penduduk yang tidak merata tidak terlepas dari adanya pengaruh geografis yaitu aspek kultur, historis, dan ekologi, serta dukungan kualitas dan kuantitas infrastruktur. Persebaran penduduk berorientasi pada potensi pertanian dan bergeser ke agroindustri. Sehingga terjadi pola pergeseran yang kurang ideal dengan kepadatan tertinggi pada daerah sentral daerah industri dan akses yang lebih baik.

Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Lampung Timur kurun waktu Tahun 2010-2014 adalah sebesar 0,97%. Pertambahan jumlah penduduk dari tahun ke tahun akan berimplikasi langsung pada meningkatnya tingkat kepadatan suatu wilayah. Kepadatan penduduk mengindikasikan

adanya pertumbuhan jumlah penduduk yang dapat dipandang sebagai modal dalam proses pembangunan.

Tabel 3. Jumlah Penduduk Kabupaten Lampung Timur 2010 – 2014

| Kecamatan | Tahun | | | | |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Metro Kibang | 20.707 | 20.932 | 21.470 | 21.966 | 22.343 |
| Batanghari | 54.601 | 55.194 | 56.154 | 57.388 | 58.252 |
| Sekampung | 59.819 | 60.468 | 60.937 | 61.798 | 62.531 |
| Marga Tiga | 43.395 | 43.866 | 44.093 | 44.871 | 45.130 |
| Sekampung Udik | 68.044 | 68.783 | 68.382 | 70.662 | 71.465 |
| Jabung | 46.550 | 47.056 | 47.345 | 48.786 | 49.473 |
| Pasir Sakti | 34.410 | 34.783 | 35.015 | 35.934 | 36.307 |
| Waway Karya | 34.454 | 34.828 | 33.834 | 33.782 | 33.605 |
| Marga Sekampung | 26.035 | 26.317 | 26.126 | 26.510 | 26.526 |
| Labuhan Maringgai | 65.750 | 66.463 | 66.096 | 68.499 | 69.682 |
| Mataram Baru | 26.672 | 26.962 | 27.202 | 27.667 | 27.935 |
| Bandar Sribhawono | 46.133 | 46.634 | 47.315 | 48.343 | 48.477 |
| Melinting | 24.630 | 24.897 | 24.836 | 25.252 | 25.409 |
| Gunung Pelindung | 21.052 | 21.281 | 21.157 | 21.373 | 21.443 |
| Way Jepara | 51.073 | 51.627 | 52.350 | 53.424 | 54.251 |
| Braja Selebah | 21.733 | 21.969 | 22.161 | 22.510 | 22.816 |
| Labuhan Ratu | 41.386 | 41.835 | 42.458 | 43.310 | 43.811 |
| Sukadana | 64.093 | 64.789 | 65.552 | 66.625 | 67.526 |
| Bumi Agung | 16.931 | 17.115 | 17.193 | 17.707 | 17.640 |
| Batanghari Nuban | 40.992 | 41.437 | 41.881 | 42.645 | 43.100 |
| Pekalongan | 45.209 | 45.700 | 46.379 | 47.270 | 48.026 |
| Raman Utara | 35.760 | 36.149 | 36.218 | 36.800 | 36.994 |
| Purbolinggo | 40.152 | 40.588 | 41.194 | 42.000 | 42.539 |
| Way Bungur | 22.058 | 22.298 | 22.655 | 23.155 | 23.439 |
| Jumlah | 951.639 | 961.971 | 968.003 | 988.277 | 998.720 |

Sumber: BPS Lampung Timur, 2015

Berdasarkan jumlah penduduk pada tabel 3, jumlah penduduk Kabupaten Lampung Timur pada Tahun 2014 adalah sebesar 998.720 jiwa dengan tingkat kepadatan 188 jiwa/km².

Data monografi penduduk di kecamatan Lampung Timur Tahun 2014, terdapat sebaran kepadatan penduduk yang beragam antar kecamatan di Kabupaten Lampung Timur. Kepadatan penduduknya berkisar 62–480

jiwa/km² dengan kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Pekalongan sebesar 480 jiwa/km² dan kepadatan penduduk terendah terdapat di Kecamatan Way Bungur sebesar 62 jiwa/km².

4. Kondisi Perekonomian Kabupaten Lampung Timur

Secara umum pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Timur dalam kurun waktu 2008-2012 tumbuh sebesar 2,26%. Pertumbuhan terbesar terjadi pada sektor pertambangan dan penggalian sebesar 12,92%, diikuti sektor industri 6,63% dan sektor perdagangan, hotel serta restoran 5,98%. Walaupun demikian, bila dilihat secara rata-rata pada tahun 2008-2012, perekonomian Kabupaten Lampung Timur tumbuh sebesar 2,26%. Penyumbang terbesar adalah sektor pertanian (1,58%), diikuti sektor pertambangan dan penggalian (1,31%), dan sektor perdagangan, hotel dan restoran (0,87%).

Sektor pertanian merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap perekonomian Kabupaten Lampung Timur. Sub sektor tanaman bahan makanan merupakan sub sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap sektor pertanian, diikuti sub sektor perikanan dan perkebunan. Sektor yang terus mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2008-2012 adalah sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Apabila dilihat dalam konstelasi ruang Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Timur merupakan satu-satunya kabupaten yang menjadikan sektor pertambangan dan penggalian sebagai sektor basis, terutama dari sub sektor minyak dan gas bumi. Keberadaan kilang minyak lepas pantai di

Pulau Segamat yang berada di wilayah Kabupaten Lampung Timur merupakan aset terbesar dari sektor pertambangan dan penggalan (BPS Lampung Timur, 2012).

5. Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Lampung Timur

Penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk yang pendapatannya lebih kecil dari pendapatan yang dibutuhkan untuk hidup layak di wilayah tempat tinggalnya. Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah penduduk miskin, tetapi dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Jumlah penduduk miskin di wilayah Kabupaten Lampung Timur adalah berdasarkan data rumah tangga. Berdasarkan data pada tabel 4 terlihat bahwa jumlah penduduk miskin per kecamatan tertinggi terdapat di Kecamatan Labuhan Maringgai dengan jumlah rumah tangga miskin sebanyak 7.191 atau sekitar 10,70%, dan jumlah penduduk miskin terendah terdapat di Kecamatan Bumi Agung dengan jumlah penduduk miskin sebesar 1.283 atau sekitar 7,41%. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel 4, yaitu:

Tabel 4. Jumlah Penduduk Miskin Per Kecamatan

| No. | Nama Kecamatan | Jumlah Keluarga Miskin |
|-----|-------------------|------------------------|
| 1 | Sukadana | 6.684 |
| 2 | Labuhan Maringgai | 7.191 |
| 3 | Jabung | 5.259 |
| 4 | Batanghari | 4.043 |
| 5 | Sekampung | 4.257 |
| 6 | Pekalongan | 3.050 |
| 7 | Way Jepara | 3.674 |
| 8 | Purbolinggo | 3.021 |
| 9 | Raman Utara | 2.144 |
| 10 | Metro Kibang | 2.428 |
| 11 | Marga Tiga | 3.434 |
| 12 | Sekampung Udik | 6.083 |
| 13 | Batanghari Nuban | 3.643 |
| 14 | Bumi Agung | 1.283 |
| 15 | Bandar Sribawono | 3.202 |
| 16 | Mataram Baru | 2.548 |
| 17 | Melinting | 2.827 |
| 18 | Gunung Pelindung | 2.297 |
| 19 | Pasir Sakti | 3.901 |
| 20 | Waway Karya | 4.842 |
| 21 | Labuhan Ratu | 3.448 |
| 22 | Braja Slebah | 2.094 |
| 23 | Way Bungur | 1.769 |
| 24 | Marga Sekampung | 2.336 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Lampung Timur, 2017

6. Jumlah Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan sumber daya manusia yang sangat dibutuhkan dalam setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan. Tenaga kerja dituntut memiliki kualitas tertentu untuk menjamin pekerja mendapatkan perlindungan dan penghasilan yang memadai untuk dapat hidup layak. Ukuran umum yang digunakan untuk melihat keterlibatan penduduk kegiatan ekonomi adalah tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), yaitu proporsi penduduk yang masuk dalam angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang terlibat dalam kegiatan produktif, karena itu

angkatan kerja terdiri dari mereka yang bekerja, sementara tidak bekerja dan mencari pekerjaan.

Tabel 5. Indikator Ketenagakerjaan Tahun 2010-2014

| Tahun | Indikator (%) | |
|-------|---|------------------------------------|
| | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) |
| 2010 | 67,7 | 4,3 |
| 2011 | 68,4 | 4,2 |
| 2012 | 67 | 2,9 |
| 2013 | 64,1 | 5,6 |
| 2014 | 67,8 | 5,0 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Lampung Timur, 2015

Tabel 5 memperlihatkan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Lampung Timur tahun 2014 adalah 67.8%. Artinya porsi penduduk usia kerja yang terlibat dalam kegiatan ekonomi di kabupaten ini sebesar 67,8%. Jika dilihat dari kenaikan jumlah angkatan kerja tahun sebelumnya, TPAK naik 3 poin yaitu dari 64,1% naik menjadi 67,8%. Naiknya TPAK ini merupakan indikasi adanya kenaikan potensi ekonomi dari sisi suplai tenaga kerja. Kemudian bila dibandingkan dengan tahun 2013, angka pengangguran turun 0,4 poin dari 5,6% menjadi 5,0%. Angka pengangguran Kabupaten Lampung Timur masih di bawah angka pengangguran nasional, dimana Tingkat Pengangguran Terbuka nasional pada tahun 2014 adalah sebesar 5,94% (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2015).

7. Sosial Budaya dan Lingkungan

Sosial budaya masyarakat Lampung Timur menunjukkan kekhasan dalam empat prinsip (Badan Pusat Statistik Lampung Timur, 2015), yaitu:

- a. Pesenggiri, diartikan sebagai segala sesuatu yang menyangkut harga diri, perilaku, sikap yang menjaga, menegakan nama baik, dan martabat secara pribadi maupun kelompok.
- b. Sakai Sembayan, meliputi kebersamaan dalam arti luas, termasuk gotong-royong, tolong-menolong, bahu-membahu dan saling memberi terhadap pihak yang memerlukan.
- c. Nemui Nyimah, bermurah hati dan ramah tamah terhadap semua orang dan terhadap siapa saja yang berhubungan dengan mereka.
- d. Bejuluk Biadek, tata ketentuan pokok yang selalu diikuti (titi gemetti) termasuk menghendaki agar seseorang selain diberi nama juga diberi gelar.

B. Gambaran Umum Kecamatan Jabung

1. Batas Administratif Kecamatan Jabung

Kecamatan Jabung merupakan bagian wilayah Kabupaten Lampung Timur yang berpenduduk 53.388 jiwa dengan luas wilayah 268,15 km², dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sekampung Udik dan Kecamatan Melinting.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Waway Karya dan Kecamatan Pasir Sakti

- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Melinting dan Kecamatan Gunung Pelindung.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Waway Karya.

Ibu Kota Kecamatan Jabung berkedudukan di Desa Negara Batin.

Wilayah Kecamatan Jabung meliputi 15 (lima belas) Desa, yaitu:

- | | |
|------------------------|---------------------|
| 1. Mekar Jaya | 5. Pematang Tahalo |
| 2. Adirejo | 6. Negara Batin |
| 3. Asahan | 7. Negara Saka |
| 4. Belimbing Sari | 8. Kecamatan Jabung |
| 9. Gunung Mekar | 13. Adi Luhur |
| 10. Benteng Sari | 14. Tanjung Sari |
| 11. Mumbang Jaya | 15. Sambu Rejo |
| 12. Gunung Sugih Kecil | |

2. Demografi Kecamatan Jabung

Penduduk Kecamatan Jabung pada tahun 2014 berjumlah 52.653 jiwa.

Data jumlah penduduk di Kecamatan Jabung dapat dilihat pada tabel pada tabel 6 bahwa desa yang memiliki jumlah penduduk paling tinggi adalah Desa Negara Batin sebanyak 6.696 jiwa, dan yang paling rendah adalah Desa Negara Saka yaitu 1.314 jiwa. Desa Negara Batin merupakan Ibukota Kecamatan Jabung, dimana Desa Negara Batin menjadi pusat pemerintahan Kecamatan Jabung.

Tabel 6. Jumlah Penduduk Kecamatan Jabung 2014

| No | Desa | Penduduk laki-laki | Penduduk perempuan | Jumlah |
|--------|--------------------|--------------------|--------------------|--------|
| 1 | Mekar Jaya | 1.263 | 1.122 | 2.385 |
| 2 | Adirejo | 1.816 | 2.032 | 3.848 |
| 3 | Asahan | 2.021 | 2.043 | 4.064 |
| 4 | Belimbing Sari | 1.144 | 1.320 | 2.464 |
| 5 | Gunung Mekar | 1.662 | 1.725 | 3.387 |
| 6 | Benteng Sari | 1.511 | 1.404 | 2.915 |
| 7 | Mumbang Jaya | 3.200 | 1.309 | 4.509 |
| 8 | Gunung Sugih Kecil | 992 | 1.345 | 2.337 |
| 9 | Pematang Taholo | 2.599 | 2.439 | 5.038 |
| 10 | Negara Batin | 3.478 | 3.218 | 6.696 |
| 11 | Negara Saka | 660 | 654 | 1.314 |
| 12 | Jabung | 3.199 | 3.047 | 6.246 |
| 13 | Adi Luhur | 2.005 | 1.614 | 3.619 |
| 14 | Tanjung Sari | 831 | 799 | 1.630 |
| 15 | Sambi Rejo | 1.043 | 1.068 | 2.111 |
| Jumlah | | 27.424 | 25.139 | 52.563 |

Sumber: Monografi Kecamatan Jabung, 2014

3. Mata Pencaharian Penduduk Kecamatan Jabung

Mata pencarian penduduk merupakan suatu kegiatan sehari-hari penduduk untuk memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, penduduk berusaha mencari lapangan kerja yang sesuai dengan kemampuannya.

Tabel 7. Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan Umum di Kecamatan Jabung

| No. | Lapangan Usaha | Jumlah |
|-------|---|--------|
| 1 | Pertanian | 10.999 |
| 2 | Pertambangan dan Penggalian | - |
| 3 | Industri Pengolahan | 184 |
| 4 | Konstruksi | 251 |
| 5 | Perdagangan, Hotel dan Restaurant | 515 |
| 6 | Pengangkutan dan Telekomunikasi | 120 |
| 7 | Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan | 80 |
| 8 | Jasa-jasa | 1.875 |
| 9 | Lainnya/Penerima Pendapatan | 104 |
| Total | | 14.128 |

Sumber: Monografi Kecamatan Jabung, 2017

Berdasarkan tabel 7 tersebut dapat diketahui bahwa penduduk di Kecamatan Jabung memiliki mata pencaharian yang beragam, namun penduduk di Kecamatan Jabung ini sebagian besar matapencahariannya adalah sebagai petani dan karyawan/buruh disebuah perusahaan ternak sapi potong. Lapangan usaha sebagai mata pencarian yang dikerjakan oleh penduduk Kecamatan Jabung pada bidang pertanian sebanyak 10.999, kemudian diurutkan kedua terdapat jasa-jasa yang dilakukan penduduk Kecamatan Jabung sebanyak 1.875. Hal tersebut menjadi bukti bahwa selain masyarakat melakukan pertanian sebagai lapangan usaha mereka, masyarakat Kecamatan Jabung juga melakukan usaha dengan jasa-jasa seperti menjadi buruh migran, dan buruh pabrik serta bangunan untuk menunjang kebutuhan hidup keluarganya.

C. Gambaran Umum Kecamatan Purbolinggo

1. Batas Administratif Kecamatan Purbolinggo

Kecamatan Purbolinggo merupakan bagian Kabupaten Lampung Timur yang berpenduduk 41.406 jiwa dengan luas wilayah 61.59 km², dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Way Bungur
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sukadana
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Taman Nasional Way Kambas
- d. Sebelah Barat Kecamatan Raman Utara

Ibukota Kecamatan Purbolinggo berkedudukan di Desa Taman Fajar.

Wilayah Kecamatan Purbolinggo meliputi 12 (dua belas) Desa, yaitu:

- | | |
|----------------|--------------------|
| 1. Taman Asri | 4. Tegal Gondo |
| 2. Taman Bogo | 5. Toto Harjo |
| 3. Tambah Dadi | 6. Tambah Luhur |
| 7. Taman Cari | 10. Tanjung Inten |
| 8. Taman Endah | 11. Tegal Yoso |
| 9. Taman Pajar | 12. Tanjung Kesuma |

2. Keadaan Geografis dan Topografi wilayah

Apabila dilihat dari topografi, semua desa di Kecamatan Purbolinggo mempunyai topografi datar. Curah hujan rata-rata Kecamatan Purbolinggo adalah 125 mm per bulan dengan jumlah hari hujan 130 hari dalam setahun. Keadaan wilayah berupa daratan yang merupakan daerah pertanian padi dan palawija. Luas penggunaan tanah dalam wilayah Kecamatan Purbolinggo 12 persen tanah sawah yang berupa sawah tadah hujan, 24 persen merupakan perkebunan rakyat, dan sembilan persen perkebunan negara. Kecamatan Purbolinggo merupakan salah satu daerah pengembangan sektor pertanian yang mampu berswasembada padi dari Wilayah Kabupaten Lampung Timur.

3. Demografi Kecamatan Purbolinggo

Penduduk Kecamatan Purbolinggo sampai Maret 2015 berjumlah 41.725. Data jumlah penduduk di Kecamatan Purbolinggo dapat

dilihat pada tabel 8. Dapat dilihat bahwa desa yang memiliki jumlah penduduk yang paling tinggi adalah Desa Tanjung Inten, dimana desa ini memang menjadi pusat pemerintahan Kecamatan Purbolinggo. Selain itu, di Desa Tanjung Inten juga menjadi pusat pendidikan di Kecamatan Purbolinggo.

Tabel 8. Jumlah Penduduk Kecamatan Purbolinggo 2015

| No. | Desa | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|-------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 1 | Taman Asri | 1.814 | 1.778 | 3.592 |
| 2 | Taman Bogo | 2.266 | 2.163 | 4.429 |
| 3 | Taman Cari | 2.025 | 2.001 | 4.026 |
| 4 | Tambah Dadi | 1.783 | 1.590 | 3.373 |
| 5 | Taman Endah | 1.524 | 1.489 | 3.013 |
| 6 | Taman Endah | 1.655 | 1.751 | 3.406 |
| 7 | Tegal Gondo | 1.005 | 999 | 2.004 |
| 8 | Toto Harjo | 2.075 | 1.854 | 3.929 |
| 9 | Tanjung Inten | 2.379 | 2.291 | 4.670 |
| 10 | Tegal Yoso | 1.633 | 1.593 | 3.226 |
| 11 | Tanjung Kesuma | 2.015 | 1.904 | 3.919 |
| 12 | Tambah Luhur | 1.094 | 1.044 | 2.138 |
| Total | | 21.268 | 20.457 | 41.725 |

Sumber: Monografi Kecamatan Purbolinggo, 2015

Perumahan rakyat menurut klarifikasi di Kecamatan Purbolinggo tahun 2013 yaitu rumah permanen, rumah semi permanen dan rumah sederhana. Penduduk di Kecamatan Purbolinggo memiliki mata pencaharian yang cukup beragam, namun sebagian besar penduduk di Kecamatan Purbolinggo bermatapencaharian sebagai petani, buruh tani dan pedagang. Perbedaan profesi ini akan menyebabkan perbedaan tingkat pendapatan dan tingkat permintaan pangan pada masyarakat. Jumlah penduduk Kecamatan Purbolinggo menurut mata pencaharian dapat dilihat pada tabel 9, yaitu:

Tabel 9. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian di Kecamatan Purbolinggo 2015

| No | Jumlah Mata Pencaharian | Jumlah (orang) | Persentase (%) |
|--------|---------------------------|----------------|----------------|
| 1 | Petani | | |
| | • Pemilik Tanah | 5.249 | 40,43 |
| | • Petani Penggarap Tanah | 278 | 2,14 |
| | • Buruh Tani | 2.439 | 18,78 |
| 2 | Pengusaha Sedang/Besar | 59 | 0,45 |
| 3 | Pengrajin/industri kecil | 64 | 0,49 |
| 4 | Buruh industri | 29 | 0,23 |
| 5 | Buruh bangunan | 287 | 2,21 |
| 6 | Pedagang | 1.877 | 14,47 |
| 7 | PNS | 1.749 | 13,47 |
| 8 | Anggota TNI/POLRI | 42 | 0,32 |
| 9 | Pensiunan (TNI/POLRI/PNS) | 429 | 3,79 |
| 10 | Peternak | | |
| | • Sapi biasa | 146 | 1,12 |
| | • Kerbau | 8 | 0,06 |
| | • Kambing | 221 | 1,70 |
| | • Ayam | 39 | 0,30 |
| | • Itik | 5 | 0,04 |
| Jumlah | | 12.984 | 100 |

Sumber: Monografi Purbolinggo, 2015

4. Pendidikan di Kecamatan Purbolinggo

Sumber daya manusia yang berkualitas diperlukan agar tercapai pembangunan yang berkualitas. Salah satu cara yang ditempuh pemerintah dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas ialah melalui penyediaan fasilitas pendidikan. Fasilitas pendidikan di Kecamatan Purbolinggo terbanyak tersedia pada tingkat sekolah dasar yang terdiri dari 191 unit ruang belajar. Fasilitas pendidikan yang tersedia untuk jenjang SMU sebanyak tiga unit sekolah dan 48 ruang belajar, untuk tingkat SMK sebanyak empat unit sekolah SMK dan 26 unit ruang belajar. Rata-rata tingkat pendidikan penduduk Kecamatan Jabung adalah tingkat SMA. Data jumlah penduduk menurut pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 10. Jumlah Penduduk menurut Tingat Pendidikan di Kecamatan Purbolinggo 2015

| No. | Pendidikan | Jumlah (orang) |
|-----|-----------------------------------|----------------|
| 1 | Belum sekolah | 2.437 |
| 2 | Buta huruf | 67 |
| 3 | Tidak tamat Sekolah Dasar | 212 |
| 4 | Tamat SD/ sederajat | 979 |
| 5 | Tamat SLTP/ sederajat | 7.426 |
| 6 | Tamat SLTA/ sederajat | 29.062 |
| 7 | Tamat akademi/ sederajat | 415 |
| 8 | Tamat perguruan tinggi/ sederajat | 719 |

Sumber: *Monografi Kecamatan Purbolinggo, 2015*

5. Tata Guna Lahan

Penggunaan lahan pertanian sebagai areal sawah di Kecamatan Purbolinggo pada tahun 2013 mencapai 30 persen. Sebagian besar lahan pertanian bukan sawah digunakan sebagai areal perkebunan, yakni sebesar 70 persen. Sektor Pertanian merupakan salah satu sektor utama dalam perekonomian Kecamatan Purbolinggo. Selama tahun 2011 luas tanam padi di kecamatan ini ialah sebesar 2.703 hektar. Luas tanam padi terbesar terdapat di Desa Taman Fajar yakni sebesar 265 hektar. Pada pertanian subsektor peternakan hewan besar jenis mamalia kambing merupakan komoditas terbanyak yang dibudidayakan. Populasi kambing yang dibudidayakan pada kecamatan ini di tahun 2013 adalah sebanyak 4.777 ekor.

Tabel 11. Luas dan Produksi Tanaman Pertanian di Kecamatan Purbolinggo 2015

| No. | Jenisnya | Luas Tanaman (ha) | Luas Panen (ha) | Produktivitas (ton/ha) |
|-----|--------------|-------------------|-----------------|------------------------|
| 1 | Padi | 4.942 | 4,937 | 4,50 |
| 2 | Jagung | 52 | 50 | 3,10 |
| 3 | Ketela pohon | 162 | 162 | 27,00 |
| 4 | Sayuran | 0,75 | 0,74 | 0,11 |
| 5 | Buah-buahan | 0,50 | 0,50 | 0,20 |
| 6 | Lain-lain | 0,50 | 0,50 | - |

Sumber: *Monografi Kecamatan Purbolinggo, 2015*

Berdasarkan tabel 11 apabila dilihat dari produksi tanaman pertanian, maka padi masih menjadi komoditas utama yang diusahakan oleh penduduk di Kecamatan Purbolinggo, dengan rata-rata produksi 4,5 ton perhektar. Kemudian pada pertanian subsektor peternakan hewan besar jenis mamalia kambing merupakan komoditas terbanyak yang dibudidayakan. Populasi kambing yang dibudidayakan pada kecamatan ini di tahun 2013 adalah sebanyak 4.777 ekor.

D. Gambaran Umum Program Malu Menganggur

Pemerintah daerah Kabupaten Lampung Timur dalam rangka mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Lampung Timur berupaya menciptakan tenaga kerja mandiri agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya melalui Program Malu Menganggur. Sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor B.1014.D/09/SK/2016 tentang Penetapan Penyuluh dan Koordinator Penyuluh Tenaga Kerja Mandiri Kabupaten Lampung Timur, bahwa dalam rangka upaya penciptaan usaha mandiri guna mengurangi jumlah pencari kerja, melalui tenaga kerja mandiri Dinas dan Lembaga Pelatihan Kerja bekerjasama untuk mengupayakan penciptaan lapangan pekerjaan dan membentuk kelompok industri kecil di setiap kecamatan di Kabupaten Lampung Timur melalui pelatihan tenaga kerja mandiri.

Program Malu Menganggur dicanangkan langsung oleh Bupati Lampung Timur, dimana penyuluh dan koordinator tenaga kerja mandiri wajib melaporkan hasil (*output*) dari pelaksanaan program dan

bertanggungjawab atas program tersebut. Program ini dikelola oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Lampung Timur yang bekerja sama dengan Lembaga Pelatihan Kerja Al Anwar.

Penyuluh dan koordinator tenaga kerja mandiri dalam Program Malu Menganggur ini mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Penyuluh tenaga kerja mandiri bertugas menyampaikan informasi dan pengetahuan umum dan pengetahuan teknis, pembinaan, pendampingan dan fasilitasi kepada masyarakat pencari kerja dan pelaku usaha mandiri dan usaha kecil menengah, industri kecil dan sejenisnya, dalam rangka perluasan kesempatan kerja dan pengembangan usaha mandiri.
2. Koordinator penyuluh tenaga kerja mandiri bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan tugas penyuluh tenaga kerja mandiri, meningkatkan kemampuan dan keterampilan serta menyampaikan informasi umum dan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas penyuluh tenaga kerja mandiri.

Program Malu Menganggur dicanangkan sejak tahun 2016 untuk 24 Kecamatan di Kabupaten Lampung Timur, yang sampai saat ini program tersebut masih berjalan. Pemerintah daerah melalui penyuluh tenaga kerja mandiri dan koordinator penyuluh tenaga kerja mandiri tersebut melakukan pelatihan terkait tenaga kerja mandiri di 24 kecamatan, dimana masing-masing dari kecamatan tersebut dituntut untuk mampu menciptakan tenaga kerja mandiri berupa produk dan keahlian terkait

pelatihan yang diberikan di setiap kecamatan dalam rangka menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi tingkat pengangguran. Program Malu Menganggur direncanakan dilaksanakan pada semua Kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Timur yaitu 24 Kecamatan. Hingga penelitian ini dilakukan, ada 13 Kecamatan yang telah terbentuk kelompok industri.

Tabel 12. Jumlah Kelompok Industri Program Malu Menganggur di Kabupaten Lampung Timur

| No. | Kecamatan | Kelompok Industri |
|-----|-------------------|--|
| 1 | Purbolinggo | - Tata Boga - Kerajinan Bambu - Membatik |
| 2 | Sekampung | - Kerajinan Bambu - Desain Grafis (sablon) |
| 3 | Batanghari | - Membatik - Desain Grafis (sablon) |
| 4 | Sekampung Udik | - Membatik - Desain Grafis (sablon) |
| 5 | Marga Tiga | - Pangkas Rambut |
| 6 | Labuhan Maringgai | - Desain Grafis (sablon) |
| 7 | Mataram Baru | - Desain Grafis (sablon) |
| 8 | Sukadana | - Desain Grafis (sablon) |
| 9 | Jebara | - Florist |
| 10 | Way Bungur | - Budidaya Ikan |
| 11 | Raman Utara | - Pupuk Organik |
| 12 | Batanghari Nuban | - Produksi Tiwul |
| 13 | Jabung | - Las Listrik - Pangkas Rambut - Tata Boga |

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2017

Berdasarkan tabel 12 terlihat bahwa ada 13 kecamatan yang sudah terbentuk kelompok industri. Ada beberapa kecamatan yang memiliki kelompok industri lebih dari satu titik, seperti kecamatan Purbolinggo, Sekampung, Batanghari, Sekampung Udik, dan Jabung. Melihat kondisi tersebut, peneliti mengambil studi di 2 kecamatan yaitu kecamatan Purbolinggo dan kecamatan Jabung sebagai perbandingan keberhasilan implementasi Program Malu Menganggur.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Implementasi kebijakan Program Malu Mengganggu Di Kabupaten Lampung Timur

Program Malu Mengganggu di Kabupaten Lampung Timur belum dilaksanakan dengan baik, terutama di Kecamatan Jabung. Kurang maksimalnya pelaksanaan program dikarenakan pencapaiannya belum menunjukkan hasil yang merata. Adapun kesimpulan untuk lebih jelasnya dapat dilihat berdasarkan enam indikator yang digunakan peneliti sebagai alat analisis Implementasi Program Malu Mengganggu di Kabupaten Lampung Timur. Enam indikator tersebut dapat dilihat pada pemaparan kesimpulan di bawah ini:

- a. Standar dan sasaran serta indikator *output* Program Malu Mengganggu telah diimplementasikan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, namun pencapaian tersebut belum maksimal karena masyarakat belum paham tentang konsep tenaga kerja mandiri. Kemudian di Kecamatan Jabung belum bisa mencapai target karena kelompok industri yang sudah dibentuk tidak berkembang.

- b. Sumber daya yang dimiliki oleh Unit Pengelola Kegiatan dalam mengimplementasikan Program Malu Menganggur telah berjalan. Tim Penyuluh (pendamping) juga telah dibuat. Anggaran dana Program Malu Menganggur dari APBD sudah ada, tetapi belum adanya dana khusus untuk Program Malu Menganggur.
- c. Menyangkut karakteristik agen pelaksana, dapat dilihat dari ketegasan dan tanggungjawab Unit Pengelola Kegiatan dalam pelaksanaan Program Malu Menganggur. Dalam pelaksanaan program tersebut, dibentuk tim yang bertanggungjawab atas terlaksananya Program Malu Menganggur, tetapi tanggungjawab tersebut belum maksimal dilakukan.
- d. Pada disposisi implementor, kecenderungan pelaksana memegang peran cukup besar dalam implementasi kebijakan Program Malu Menganggur. Sikap pelaksana mendukung adanya pelaksanaan kebijakan tersebut, hampir semua Tim Fasilitator ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan. Mereka mempunyai komitmen untuk senantiasa melibatkan masyarakat miskin dan menganggur dalam pelaksanaan program, mereka juga tidak bosan mengingatkan Kepada Tim Pendamping kegiatan Program Malu Menganggur agar masyarakat tersebut selalu terlibat. Sikap pelaksana tanggung jawab dalam pelaksanaan program, mereka turun langsung ke lapangan untuk mengawasi masyarakat dalam melaksanakan program dari mulai sosialisasi sampai masyarakat bisa membuat produk.

- e. Keberhasilan yang dicapai pada implementasi Program Malu Menganggur tidak terlepas dari komunikasi yang tepat antar organisasi dan juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pelaksana. Pemberian instruksi yang cukup baik dari Lembaga Pelatihan Kerja kepada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Tetapi koordinasi dari Dinas dengan aparat Kecamatan dan Desa yang mempunyai hubungan untuk menyampaikan informasi ke masyarakat belum maksimal. Komunikasi dan koordinasi antara masyarakat dengan pelaku-pelaku di Desa, Kecamatan dan Kabupaten dalam pelaksanaan kegiatan Program Malu Menganggur juga belum maksimal.
 - f. Kondisi ekonomi masyarakat di Kabupaten Lampung Timur angka pengangguran lebih banyak terjadi pada perempuan dari pada laki-laki, kondisi ekonomi masyarakat rata-rata adalah petani. Kondisi sosial masyarakat di Kabupaten Lampung Timur dinilai cukup baik dalam mendorong keberhasilan implementasi kebijakan Program Malu Menganggur terutama di Kecamatan Purbolinggo, perbedaan suku mempengaruhi pelaksanaan program. Kondisi politik masyarakat termasuk kondusif, karena telah mengeluarkan surat keputusan terkait tenaga kerja mandiri khususnya di bidang pembangunan daerah.
2. Faktor penghambat dalam implementasi Program Malu Menganggur di Kabupaten Lampung Timur, diantaranya adalah:
- a. Terkait dengan sumberdaya manusia yaitu Unit Pengelola Kegiatan Program Malu Menganggur yang belum memahami konsep tenaga kerja mandiri.

- b. Kemudian kendala dari sumberdaya finansial yaitu keterbatasan dana dari pemerintah karena belum adanya anggaran dana khusus untuk Program Malu Menganggur.
- c. Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mewujudkan tenaga kerja mandiri. Masyarakat masih sulit untuk memahami konsep tenaga kerja mandiri, sehingga tidak bisa berfikir maju untuk kesejahteraan hidupnya.

B. Saran

Adapun rekomendasi saran untuk Unit Pengelola Kegiatan Program Malu Menganggur adalah:

1. Lembaga Pelatihan Kerja Al Anwar dan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja perlu melakukan sosialisasi lanjutan terkait tenaga kerja mandiri dalam skala besar dan manajemen pemasaran lebih *detail*, agar sumber daya manusia yaitu Unit Pengengola Kegiatan dan masyarakat dapat memahami konsep tenaga kerja mandiri pada Program Malu Menganggur dalam upaya menciptakan tenaga kerja mandiri dan industri kecil untuk meningkatkan perekonomian masyarakat agar masyarakat dapat menjual produknya dalam skala besar dan berkelanjutan.
2. Perlu adanya peningkatan koordinasi antara Unit Pengelola Kegiatan dan Tim Pendamping di lapangan. Dengan koordinasi yang baik, maka tidak ada kesalahpahaman antara pelaksana program, sehingga dapat meminimalisir permasalahan yang terjadi di lapangan.

3. Perlu adanya dana khusus dari Pemerintah Daerah untuk Program Malu Menganggur, agar dapat memberikan fasilitas yang cukup untuk kelompok industri pada saat pelaksanaan pelatihan tenaga kerja mandiri lanjutan sesuai jumlah kelompok industri yang sudah terbentuk.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukur. 1988. *Laporan Temu Kajian Posisi dan Peran Ilmu Administrasi Negara dan Manajemen*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia dan Asia Foundation.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Moleong J, Lexy. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Posdakarya Offset.
- Nurzaman, Siti Sutriah. 2002. *Perencanaan Wilayah di Indonesia: Pada Masa Sekitar Krisis*. Bandung: Penerbit ITB.
- Sahya, Anggara. 2012. *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sjafrizal. 2008. *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi*. Padang: Baduose Media.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta.
- Suharno. 2013. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Sulistio, Eko Budi. 2009. *Kebijakan Publik (Public Policy) Kerangka Dasar Studi Kebijakan Publik*. Lampung.
- Suparmoko, M. 2002. *Ekonomi Publik, Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta.

Sumber Lain

- Bappeda, 2014. *Survei Potensi Sosial Ekonomi Sentra Susu Sapi Cipageran Kota Cimahi*. Bappeda Kota Cimahi.
- BPS Provinsi Lampung, 2017. <https://lampung.bps.go.id/>. Diakses pada tanggal 22 Juli 2017.

BPS Lampung Timur, 2014. <https://lampungtimurkab.bps.go.id>. Diakses pada tanggal 25 Juli 2017.

<http://kenali.co/berita-1206-kiprah-chusnunia-bupati-perempuan-pertama-di-sumatera.html>. Diakses pada tanggal 24 Juli 2017.

Surat Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor: B.1014.D/09/SK/2016 tentang Penetapan Penyuluh dan Koordinator Penyuluh Tenaga Kerja Mandiri Kabupaten Lampung Timur.